



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(VII)**

**JAKARTA**

**RABU, 2 MEI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII)

Rabu, 2 Mei 2012, Pukul 11.04 – 13.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2. Ahmad Sodiki         | (Anggota) |
| 3. Achmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman          | (Anggota) |
| 5. Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 6. Harjono              | (Anggota) |
| 7. M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 8. Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9. Muhammad Alim        | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Milang Tauhida
2. Febri Hendri Antoni Arif

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Emerson Yuntho
2. Iki Dulagin

C. Ahli dari Pemohon:

1. Bagus Takwin
2. Itje Khadjah

D. Saksi dari Pemohon:

1. Musni Umar
2. Heru

E. Pemerintah:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Muallimin Abdi      | 8. Nurma            |
| 2. Suyanto             | 9. Sri Renani       |
| 3. Agung Budi Susanto  | 10. Raya            |
| 4. Ibrahim Bafadal     | 11. Toto Suprayitno |
| 5. Didik Suhardi       | 12. Rini Wulandari  |
| 6. Wolter Siringoringo | 13. Alimudin        |
| 7. Sumarno             | 14. Mujiyem         |

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Slamet

G. Saksi dari Pemohon:

1. Akhmad Solihin
2. Popo Riyadi
3. Rahmi Djuli
4. Prastowo
5. Sulasih

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD..

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari pihak-pihak dalam Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan hari ini yang hadir Kuasa Hukum, saya Emerson Yuntho, kemudian ada Pak Iki Dulagin, dan kita juga hadir Pemohon Prinsipal, Pak Febri Hendri Anthoni, Ibu Taulida. Kita juga hadir Ahli, Ibu Itje Khadijah, kemudian Saksi, juga Pak Heru, dengan pak ... siapa satu lagi ... Musni Umar, dan satu lagi ada kesaksian secara tertulis dari Ahli Pak Tilaar, hari ini dia masih sakit. Kita akan sampaikan secara tertulis. Dan kemudian, berikutnya kalau masih ada kesempatan ada ahli lagi ... saksi, Pak, yang kita coba ajukan ke Majelis tiga ... tiga ahli kalau masih mung ... tiga saksi kalau masih mungkin untuk sidang minggu depan. Dan kemudian, ada ahli yang belum disumpah tapi sudah kita ajukan, Pak Bagus Takwin, masih dalam perjalanan.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, akan saya sebutkan dari yang paling ujung. Prof. Dr. Suyanto, Direktur Pendidikan Dasar ... Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Kemudian, di sebelah kanannya ada Dr. Ibrahim Bafadal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, di sebelah kanannya lagi ada Dr. Agung Budi Susanto, sama, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, di sebelah kanannya lagi ada Ibu Renani, sama Yang Mulia. Kemudian, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di sebelah kanan ada Wolter Siringoringo, kemudian di sebelah kanannya lagi ada Dr. Didik Suhardi ... Dr. Didik Suhardi. Kemudian di belakang, Yang Mulia, ada kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian dan Kebudayaan, ada

Saudara Raya, Rini Wulandari, Toto Supriyadi, Sumarno, Alimudin, dan Mujiyem, dan Ibu Nurma.

Kemudian, Yang Mulia, sebagaimana pada persidangan yang lalu, ada beberapa saksi, kalau ahli dari Pemerintah sudah semua didengar. Kemudian, ada beberapa saksi yang sudah disumpah, tetapi karena satu dan lain hal, seperti Saksi Bapak Agus Salim yang dari Lumajang belum bisa hadir untuk pada persidangan sekarang. Kemudian, ada Ibu Yanti Susanti juga belum bisa hadir. Kemudian, ada Prof. Dr. Sukarno, M.Si., juga belum bisa hadir. Tetapi yang hadir yang sudah disumpah pada persidangan yang lalu adalah sekarang yang sudah di hadapan Yang Mulia, ada Pak Akhmad Solikhin sudah ada di hadapan Yang Mulia. Kemudian, ada Pak Popo Riyadi sudah ada, kemudian Rahmi Djuli sudah ada, kemudian Prastowo sudah ada, dan Sulasih sudah ada, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Bambang belum datang ya?

6. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Pak Bambang belum, Yang Mulia. Kemudian, lanjut, Yang Mulia, sebelum ... kemudian, ada ahli Pemerintah yang sudah mendengarkan keternagnnya, tetapi barangkali mau diklarifikasi atau ditanya-tanya ... apa ... untuk lebih diperdalam. Beliau adalah yang sudah hadir ada Prof. Dr. Slamet, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Terserah kepada Pemohon nanti, apakah sesudah mendengar kesaksian-kesaksian dan keterangan para ahli hari ini masih akan mengusulkan dibuka sidang lagi seperti yang tadi diusulkan, masih ada tiga lagi yang mau diajukan. Tetapi sidang ini sudah ... sebenarnya sudah cukup panjang ... apa ... kesaksian-kesaksian sebenarnya sudah cukup komprehensif, tetapi kami tidak ... apa ... tidak bisa terlalu membatasi, kecuali halnya memang sudah sangat jelas sekali. Sehingga nanti bisa dijadwal sebenarnya untuk langkah-langkah selanjutnya pada sidang pengucapan vonis ya. Kadangkala ada orang bertanya, vonisnya kapan, padahal sidangnya saja baru ditutup dua hari sebelumnya, sudah tanya vonis, yang antre vonis itu banyak. Tapi terserah nanti, kita dengarkan dululah kesaksian-kesaksian dan keterangan dari ahli maupun dari Pemerintah.

Kita mulai dari saksi yang diajukan oleh Pemerintah, yaitu ... siapa, Pak, yang mau duluan?

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan Pak Akhmad Solikhin, S.Pd., M.M. Silakan, Pak. Beliau adalah Kepala SDN 01 Menteng, Yang Mulia. Ya, terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak.

10. SAKSI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SOLIKHIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya Ahmad Solikhin, Kepala SD RSBI Menteng 01, Jakarta Pusat, untuk memberi kesaksian sehubungan dengan uji materi atau judicial review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (2).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hal yang pertama yang ingin kami bicarakan adalah mengenai isu bahwa RSDBI bersifat diskriminatif. Kami ingin berikan sebuah paparan bahwa pendaftaran peserta didik baru SDN RSBI Menteng 01 Jakarta, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada aturan main yang kami pegang. Jadi, kami mempunyai landasan hukum yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru. Proses pendaftaran awal peserta didik baru dilakukan secara online melalui website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sehingga kesempatan untuk melakukan pendaftaran terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan putera-puterinya di SDN RSBI Menteng 01. Dalam proses PPDB, sekolah tidak melakukan pemungutan biaya pendaftaran alias gratis. Karena semua pendaftaran dilakukan secara online. Untuk syarat-syarat PPDB berpedoman pada keputusan kepala dinas antara lain tentang umur dan berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan.

Jadi, tidak hanya bagi orang-orang yang dekat dengan sekolah saja, tetapi semua orang yang memenuhi persyaratan secara administratif. Selama ini rasio pendaftar dengan daya tampung tidak seimbang, pengalaman kami biasanya rasio itu bisa mencapai satu berbanding lima. Oleh karena itu, SDN Menteng 01 Jakarta mengadakan proses seleksi. Materi Seleksi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari guru-guru TK dan guru-guru kelas 1 yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang materinya disesuaikan dengan kurikulum taman kanak-kanak. Setelah proses seleksi dilakukan, nilai hasil seluruh peserta di-upload ke website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, untuk diolah dan ditentukan kelulusannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu baru diumumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru melalui website PPDB DKI. Ini jelas

bahwa hasil seleksi PPDB ini tidak ada hubungannya dengan masalah sumbangan peserta didik baru atau hal apapun mengenai keuangan. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa pendaftaran peserta didik baru dipungut biaya, itu adalah sebuah kebohongan besar karena proses ini selalu dipantau terus oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan bersifat online. PPDB di SDN Menteng 01 biasanya dilaksanakan pada bulan Mei sebelum tahun pelajaran baru dimulai.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengenai bahwa isu komersialisasi di RSDBI. Sesuai dengan syarat ... sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bahwa untuk memenuhi biaya operasional dan pemenuhan sarana prasarana sekolah demi memenuhi standar RSBI, maka SD RSBI Menteng 01 dapat menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat peduli pendidikan. Kami ingin sampaikan bahwa yang disebut masyarakat peduli pendidikan itu tidak hanya orang tua murid, tetapi kita juga menghimpun kepedulian dari dunia usaha dan dunia industri yang ada di Jakarta ini.

Kegiatan menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat ini dilakukan oleh komite sekolah, bukan oleh kepala sekolah maupun oleh guru. Dan sumbangan itu bersifat tidak memaksa atau bersifat sukarela. Ketentuan mengenai besarnya sumbangan masyarakat peduli pendidikan orang tua siswa adalah hasil musyawarah antara komite sekolah dengan orang tua siswa berdasarkan pada program sekolah yang dibahas pada komite sekolah. Pelaksana rapat komite sekolah oleh pengurus komite sekolah bersama dengan orang tua siswa peserta didik baru, dilakukan pada bulan Oktober, sementara penerimaan kelas 1 itu dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Oleh karena itu, jadi ini jelas bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan peserta didik baru dengan sumbangan yang diberikan oleh orang tua. Walaupun pada saat rapat komite sekolah ditentukan rata-rata jumlah sumbangan setiap siswa, tetapi realitanya yang ada tidak semua sumbangan sama karena kita menganut sistem subsidi silang. Artinya bahwa yang punya membantu yang tidak punya, yang kaya membantu yang miskin. Ini menjadi sistem di SDN RSBI Menteng 01. Bahkan ada siswa yang kita gratiskan, sama ... kita gratiskan sama sekali dalam pembiayaan pendidikan dan keperluan si sekolah ... siswa yang bersangkutan justru dibantu oleh sekolah, seperti buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya. Kepada siswa yang bersangkutan pun kita perlakukan sama dengan siswa yang lain tanpa membeda-bedakan, bahkan karena mereka mempunyai potensi dibidang tertentu seperti olahraga, maka mereka sering mewakili sekolah untuk berkompetisi mengikuti kegiatan dan lomba sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dia miliki. Jika, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menginginkan kesaksian langsung orang tua siswa tersebut. Maka, orang tua tersebut ada dihadapan Yang Mulia dan nanti bisa diminta penjelasannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal ketiga yang ingin disampaikan dikatakan bahwa RSDBI tidak nasionalis. Perlu kami jelaskan pengalaman kami mengelola RSDBI Menteng 01 Jakarta Pusat. Bahwa kurikulum yang digunakan RSBI Menteng masuk tetap berdasarkan standar isi diperkaya dengan kurikulum yang diperlukan oleh negara-negara maju di bidang pendidikan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi kurikulum tersebut. Jenis mata pelajaran pun sama dengan sekolah-sekolah yang lain, hanya kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk semua mata pelajaran pun sama, yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi kalau kita lihat pelajaran PKN dan IPS ada kompetensi dasar khusus yang membahasa tentang konsep dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami juga mempunyai program yang kami sebut dengan belajar ke sumber belajar langsung. Misalnya, siswa kami ajak belajar langsung ke lembaga-lembaga negara, seperti KPU, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Hal itu dimaksudkan agar siswa mendapatkan pengalaman langsung dari sumbernya dan tidak bersifat teoritik saja dalam belajar. Untuk pelajaran IPA dan Matematika memang diseimbangkan dengan Balinglo, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, kami tekankan tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu berkompetisi ketika mengikuti ajang kompetisi di tingkat internasional. Kita tahu bahwa salah bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, anak-anak kita kita bekali salah satu bahasa itu.

Dalam program sekolah kita pun rutin mengadakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional bahkan dalam lomba tata upacara bendera, RSBI beberapa kali menjadi juara dalam kompetisi. Hal ini membuktikan bahwa RSBI tetap mempunyai jiwa nasionalis dan cinta tanah air yang tinggi.

Pada pelajaran seni musik, kami juga mengajarkan lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah. Kami juga mempunyai grup musik tradisional betawi (Gambang Kromong) yang merupakan musik tradisional betawi. Bahkan beberapa kali grup musik Gambang Kromong itu bisa mengiringi kompetisi lomba Abang dan None di Jakarta. Ini membuktikan bahwa SD RSBI Menteng 01 Jakarta adalah pelestari budaya bangsa yang mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kami juga mengajarkan seni tari tradisional Indonesia, di samping tari kreasi yang baru. Bahkan delegasi SDN Menteng 01 Jakarta sudah beberapa kali keluar negeri di bawah AOV, yaitu sebuah lembaga di bawah UNESCO PBB sebagai duta budaya bangsa Indonesia untuk mengikuti festival dan kompetisi di tingkat internasional dengan hasil yang menurut kami luar biasa, tiga kali, tahun 2011-2012, dan tahun 2012 pula duta budaya dari SD Menteng 01 selalu mendapatkan Awards dan best performance.



Majelis Hakim Yang Mulia, ada satu hal yang sangat membanggakan bagi kami. Salah satu sekolah internasional yang ada di Jakarta mengajukan proposal untuk partnership atau (Suara tidak terdengar jelas) dengan SDN RSBI Menteng 01 karena kami dianggap sebagai sekolah yang konsen melestarikan budaya bangsa, terutama berdasarkan seni tari dan musik tradisional. Dan guru kami diminta memberikan pelatihan seni tari dan musik tradisional kepada guru dan sekolah tersebut yang notabene guru dan murid sekolah tersebut berasal bukan dari warga negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa RSDI/RSBI menjadi salah satu pelopor pelestari budaya bangsa. Kegiatan pramuka juga dilaksanakan di sekolah, program kegiatan yang dilaksanakan pun bertujuan meningkatkan nasionalisme, patriotisme, kemandirian, kerjasama, dan gotong royong diantara siswa. Bahkan hampir disetiap kegiatan selalu ikut dan meraih prestasi.

Yang keempat, dikatakan bahwa RSBI miskin dengan prestasi. Ingin kami sampaikan bahwa untuk memfasilitasi pengembangan diri siswa secara optimal, sekolah membuat program yang bersifat akademik dan mampu non akademik. Dalam hal prestasi SDN RSBI Menteng 01 pun meraih peringkat terbaik. Mulai dari tingkat lokal, nasional, regional asia Tenggara dan juga internasional. Misalnya, di dalam olimpiade sains dan math mendapat medali perunggu. Kemudian kejuaraan karate pelajar se-Asia, mendapatkan medali emas. Kejuaraan perenang tingkat pelajar tingkat nasional mendapatkan berpuluh-puluh medali emas dan kejuaraan Robotic Asean di Singapore kita juga mendapatkan best performance. Belum lagi prestasi yang di tingkat kotamadya maupun prestasi yang sangat banyak jumlahnya dan tentu saja tidak ada waktu bagi kami untuk menjelaskan di sini dan itupun dilaksanakan SD RSBI di provinsi lain, Yang Mulia. Informasi ini kami dapatkan karena SD RSBI di Indonesia itu mempunyai net working. Bukti dan laporan tertulis akan kami sampaikan jika Yang Mulia Majelis Hakim menginginkan hal itu.

Demikianlah Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kesaksian yang kami berikan demi kebenaran yang memihak kepada masa depan anak-anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Berikutnya, Pak.

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Pak Popo Riyadi dipersilakan.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

#### 14. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Assalamualaikum wr. wb. Kesaksian Kepala SMP Negeri 1 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, saya sendiri Popo Riyadi, S.Pd., M.Pd. Atas permohonan hak uji materi Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Perkenankan kami memberikan kesaksian layanan RSBI di SMP Negeri 1 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Kami akan menanggapi pendapat dari Pemohon. Yang pertama, Pemohon berpendapat bahwa satuan pendidikan RSBI bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggapan kami. RSBI adalah salah satu bentuk inovasi dan percepatan dalam peningkatan mutu pendidikan serta pemberian layanan pendidikan yang merupakan pengkategorian satuan pendidikan yang masih menjadi bagian sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya, Yang Mulia, adanya RSBI di SMP 1 Kota Magelang, juga memberikan semangat kepada masyarakat Magelang, dan para peserta didik untuk lebih berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang nonakademik. Dengan adanya RSBI ini justru kualitas sekolah kami semakin meningkat karena kualitas para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua serta peserta didik menjadi lebih baik dan lebih terpacu untuk memajukan sekolah. Adanya RSBI di SMP 1 Kota Magelang adalah merupakan satu model pembelajaran para pendidik. Pendidik kami akan semakin aktif, kreatif, inovatif untuk merangsang peserta didik, mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin. Model-model presentasi, diskusi kelompok, e-learning, dan lain sebagainya merupakan model pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami.

Selanjutnya bidang manajemen sekolah juga semakin baik, sehingga keterlibatan para stakeholder sekolah juga semakin meningkat, kepercayaan masyarakat lebih baik. Hal ini berdampak positif terhadap layanan pendidikan karena kami melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Memberdayakan masyarakat yang transparan, yang partisipatif, sehingga manajemen di SMP 1 Kota Magelang juga didokumentasikan dalam bentuk video best practice oleh Direktorat di SMP dan dijadikan model manajemen secara nasional.

Selanjutnya Yang Mulia, RSBI di SMP 1 Kota Magelang menyebabkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan layanan yang semakin berkualitas, yang berdampak pula kepada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Seperti kompetensi profesional para pendidik kami dalam keahliannya semakin meningkat. Kompetensi pedagogisnya, metode pembelajarannya semakin ... semakin meningkat pula. Adapun warga masyarakat Magelang pun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan tidak hanya masyarakat Magelang tetapi masyarakat sekitarnya.

Apabila pendaftar lebih banyak dari daya tampung, maka kami melaksanakan seleksi. Rata-rata pendaftar di tempat kami lebih dari 500 orang. Padahal kami hanya menerima 168 orang, sehingga kami harus melaksanakan seleksi.

Yang kedua, Yang Mulia, pendapat Pemohon bahwa satuan pendidikan RSBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggapan kami, SMP Negeri 1 Magelang melaksanakan pendidikan yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Memberikan kebebasan peserta didik untuk berekspresi, mengembangkan ide-ide kreatif, berkarya, mengembangkan budaya bangsa ini, dan tidak ada perbedaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Antara lain yang kami lakukan pada mata pelajaran Agama, kami melakukan juga dalam kurikulum kami ada pelajaran Pendidikan Agama, semua agama kami layani. Pelajaran PKN diharapkan mengembangkan jiwa kebangsaan. Setiap hari Senin, hari-hari besar, kami pun juga melakukan upacara bendera agar jiwa kebangsaan juga tetap terjaga. Pada mata pelajaran Seni dan Budaya, juga tetap kami lakukan, kita ajarkan, diharapkan tetap menjaga budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Pelajaran Bahasa Jawa karena kami di Jawa Tengah, harapan bahasa ibu tetap terjaga, serta menjaga warisan budaya bangsa ini.

Yang Mulia, di RSBI SMP 1 Kota Magelang lebih mengembangkan kepribadian peserta didik yang utuh dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan terintegrasi dengan mata pelajaran. Pada kegiatan sehari-hari diharapkan semakin meningkatkan kepribadian peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, tanggung jawab, jujur. Hal ini yang kami lakukan dengan pengembangan kepribadian dengan layanan bimbingan konseling, layanan ekstrakurikuler, layanan manajemen.

Pengembangan disiplin, tanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, bela diri, pencak silat, karate, dan lain sebagainya. Pengembangan karir masa depan anak-anak, kami ada kegiatan yang namanya carrier day. Pengembangan sosial, ada social activity. Pengembangan kreativitas siswa dengan kegiatan small project, dan masih banyak lagi.

Yang ketiga, Yang Mulia, pendapat Pemohon bahwa RSBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Tanggapan kami bahwa RSBI di SMP 1 tidak menggunakan kurikulum internasional, tetapi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP 1 Kota Magelang. Bukti terlampir, Yang Mulia, nanti akan kami serahkan.

Di SMP 1 Kota Magelang dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Hanya terbatas pada mata pelajaran Matematika, IPA, disampaikan dengan bilingual. Artinya dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bukan sepenuhnya bahasa Inggris. Maksimal 30% untuk bahasa Inggrisnya.

Di SMP 1 Kota Magelang tidak membeli lisensi akreditasi dari luar negeri, dari IBO, dari Cambridge, tidak. Kami melaksanakan kurikulum nasional dengan tes ujian nasional, dan juga tes ujian yang dibuat oleh direktorat PSMP, bukan dari luar negeri.

Selanjutnya, Yang Mulia, pendapat Pemohon bahwa RSBI adalah bentuk baru liberalisme pendidikan. Tanggapan kami bahwa di SMP 1 Kota Magelang tidak melakukan pungutan kepada orang tua, tetapi orang tua berpartisipasi dalam bentuk sumbangan secara ikhlas yang dinyatakan dalam bentuk tulisan sendiri. Bukti terlampir surat pernyataan contoh orang tua. Orang tua menulis sendiri pernyataan ditulis sendiri, tidak dibuatkan blangko oleh sekolah.

RSBI di SMP 1 Kota menggala ... Magelang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang miskin, jelas yang tidak mampu jelas tidak menyumbang. Yang mampu saja ada yang tidak menyumbang. RSBI SMP 1 Kota Magelang mengusahakan beasiswa untuk siswa-siswa yang tidak mampu, antara lain beasiswa miskin, beasiswa prestasi, bahkan transpor siswa. Kami berusaha bekerja sama dengan Bank Kota Megelang, dengan alumni, dengan masyarakat, bahkan bapak/ibu guru pun, serta karyawan juga ikut memberikan beasiswa kepada anak-anak kami. Bukti terlampir, nanti akan kami haturkan, Yang Mulia.

Bahkan, Yang Mulia, OSIS SMP 1 Kota Magelang melaksanakan kepedulian sosial dalam bentuk social activity. Membantu orang-orang miskin. Pakaian dibantu, buku, kacamata dibantu, bahkan rumah orang tua yang tidak mampu pun dibedah, modal usaha diberikan dalam rangka untuk mengembangkan sosial anak-anak peserta didik kami, jadi sumbangan dari orang tua itu adalah yang mau menyumbang.

Yang Mulia, pendapat Pemohon yang ke lima bahwa RSBI menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Tanggapan kami RSBI di SMP 1 Kota Magelang dalam mengadakan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mendasarkan pada tes tertulis mata pelajaran, tes tertulis terpadu, dan bonus prestasi kejuaraan, tidak mendasarkan pada kemampuan finansial orang tua serta besaran sumbangannya, serta tidak dilaksanakan tes wawancara untuk mengukur kemampuan orang tua tidak kami lakukan. RSBI di SMP 1 Kota Magelang dalam penerimaan siswa baru tidak diskriminatif termasuk juga tidak membedakan keluarga mampu, miskin, ras, suku, golongan, agama, Pejabat DPR, dan lain sebagainya tidak. Bukti terlampir pada leaflet PPDP yang kami aturkan. RSBI di SMP 1 Kota Magelang tidak mendiskriminasikan dalam pembagian kelas, kelas dibagi-bagi yang pintar, yang kurang, dan seterusnya tidak. Tetapi dilaksanakan secara acak dan rata dalam kemampuannya sehingga diharapkan siswa saling memberi dan menerima satu sama dengan yang lainnya.

Yang ke enam, Yang Mulia. Pendapat Pemohon bahwa RSBI berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia. Tanggapan kami RSPI di SMP 1 Kota Magelang dalam pembelajaran

sehari-hari menggunakan Bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, dan IPA tadi maksimal hanya 30% untuk Bahasa Inggrisnya.

Yang Mulia, dengan adanya RSBI prestasi di SMP 1 Kota Magelang semakin bagus terbukti sebelum RSBI nilai ujian nasional diperingkat ke 5 tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi setelah RSBI selalu menjadi peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah bahkan di tingkat nasional Tahun 2009/2010 kami bisa mencapai peringkat 5 Nasional, dan tahun terakhir kemarin 2010/2011 peringkat 3 Nasional untuk sekolah negeri. Prestasi yang lain, Yang Mulia. kalau sebelum RSBI kami belum pernah mendapatkan prestasi tingkat professional sekarang alhamdulillah meski baru beberapa kali sudah mencapai tingkat internasional. Medali Emas Olimpiade Nasional kami raih juga, Medali Perak Olimpiade, Medali Perunggu, Olimpiade tingkat nasional bahkan tingkat internasional pun kami mendapatkan yakni Aero International Robotic Olimpiade. Kami pernah anak-anak kami ke Turki untuk presentasi Lomba Robotic International, Matematika juga tingkat internasional.

Selanjutnya, Yang Mulia. Ada pun perbedaan SSN dan RSBI secara umum kami aturkan bahwa RSBI prinsipnya adalah standar nasional pendidikan, sama tetapi ada penguatan, ada lebihnya. Lebihnya antara lain di standar kompetensi lulusan. Kalau SSN standar kompetensi lulusan itu hanya 22 poin tetapi RSBI selain selain 22 ditambah 2 poin lagi. Itu adalah kompetensi dalam bidang IT. Yang kedua, kompetensi di ketangguhan, kreatifitas, kedisiplinan, itu yang kalau lebih.

Yang kedua, RSBI jelas kemampuan dalam bidang bahasa asing, bahasa Inggris lebih dibandingkan sekolah standar nasional. Yang ke tiga, yang lebih lagi adalah kemampuan dalam bidang ICT. ICT tidak hanya digunakan untuk belajar ICT tetapi ICT sudah dimanfaatkan untuk mengakses pembelajaran.

Hakim Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia. Prestasi yang lain anak kami juga diundang oleh a British Council ke Taiwan karena kegiatan connecting classroom online, ini adalah prestasi. Anak kami diundang juga untuk lomba internasional lukis di Singapore. Hal ini menunjukkan bahwa RSBI banyak kelebihannya.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di standar proses bahwa active learning merupakan andalan kami. Anak-anaklah yang aktif untuk belajar dengan memanfaatkan e learning, electronic learning-nya. Di standar penilaian, Yang Mulia, kami tidak mengambil penilaian dari luar negeri, kami memanfaatkan penilaian berbasis online meskipun masih dalam rintisan dan kami memanfaatkan penilaian dan diuji oleh Direktorat PSNP.

Di standar pengelolaan, Yang Mulia, lebihnya kami memiliki sister school dengan sekolah-sekolah lain di dalam negeri. Di luar negeri ada tetapi tidak harus di luar negeri.

Yang Mulia, perlu kami rangkum. Berdasarkan uraian tersebut di atas akan kami simpulkan pendapat kami. Yang pertama, bahwa RSBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa,

justru mendukung dan mempercepat serta memberi semangat peningkatan kecerdasan bangsa.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara saksi saya kira cukup. Saudara tidak perlu menyimpulkan, karena Saudara saksi.

16. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bukan Ahli, Ahli yang bisa menyimpulkan.

18. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi hanya bercerita seperti tadi sudah cukup, oke.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Kami tambahkan untuk gambar-gambarnya, Yang Mulia.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh.

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Yang Mulia, ini adalah prestasi internasional anak kami, matematika, medali emas, perak, dan perunggu, bahasa Inggris, medali perunggu, lukis peringkat lima nasional dan peringkat lima Asia.

Selanjutnya. Ini adalah anak kami yang ke Turki karena robotik tingkat nasional juara satu dan dikirim ke Turki menjadikan best presentation di Turki.

Selanjutnya. Budaya kami Gambyong, sendratari Ramayana, Yang Mulia, tetap kami pegang secara kuat, inilah budaya kita. Tamu-tamu yang dari maaf, dari Australia datang ke tempat kami, bukan kami yang pergi ke Australia tetapi dari Australia sekolah yang datang ke sini. Dari Australia kita jamu bahkan bapak wakil walikota pun juga siap untuk memberikan jamuannya.

Kelanjutannya. Guru-guru kami berprestasi jika diberi hadiah dari direktorat maupun dari gubernur, sehingga disekolahkan ke Australia ada tiga orang.

Selanjutnya. Guru tamu dari Australia selalu setiap tahun datang, tidak kami yang berangkat ke sana tetapi dari sanalah yang harus ke sini.

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Bukti, Yang Mulia, berkenan kami haturkan yang tadi saya sampaikan.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Mohon maaf (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Izin, Yang Mulia. Jika diizinkan Ahli kami ... Ahli dan Saksi dari Pemohon Bapak Bagus Takwin, Itje, dan Musni Umar, bisa lebih awal karena kepentingan setelah sidang ini dia akan mengajar.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh, bergantian.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ya.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam. Baik, ditunda dulu sisanya ya Pemerintah. Sekarang kita ke Saksi Pemohon.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Yang Mulia, untuk Bapak Bagus Takwin belum disumpah.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Siapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Bagus Takwin.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mana orangnya? Ini saksi atau ahli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ahli, maaf Pak.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan maju. Maju, maju dulu untuk diambil sumpah sini. Pak Fadlil ... beragama Islam Pak Bagus? Agama apa Bapak? Islam. Pak Fadlil.

36. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan Bapak mengikuti kata-kata sumpahnya menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

37. AHLI BERAGAMA ISLAM

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

38. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan duduk. Saudara Pemohon, siapa yang mau ditampilkan lebih dulu ini?



40. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Pak Bagus Takwin, Pak.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Bagus, silakan.

42. AHLI DARI PEMOHON: BAGUS TAKWIN

Terima kasih, selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya akan mengajukan kesaksiaan saya berdasarkan keahlian saya mengenai masalah-masalah yang mungkin dihasilkan dan dampak negatif yang mungkin muncul dari Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional.

Sebelumnya izinkan saya untuk berangkat dari satu asumsi yang saya ambil dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (...)

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sebentar, Saudara! Supaya ini belum ada data Saudara ... CV Saudara. Keahlian Saudara apa, latar belakang, bisa cerita sedikit?

44. AHLI DARI PEMOHON: BAGUS TAKWIN

Oke. Terima kasih. Maaf, nama saya Bagus Takwin, saya sehari-hari bekerja Dosen di Fakultas Psikologi UI. Saya mengajar mata kuliah Psikologi Pendidikan, Psikologi Kepribadian, Filsafat Manusia, dan juga Metode Pengukuran Alat Ukur.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Teruskan ke materinya tadi!

46. AHLI DARI PEMOHON: BAGUS TAKWIN

Oke. Terima kasih. Jadi, saya menggunakan asumsi dasar yang saya ambil dari Undang-Undang Dasar 1945, teori-teori pendidikan, dan teori-teori psikologi sosial. Dalam pemahaman saya, pendidikan adalah hak warga negara dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, tentunya pendidikan dalam arti yang sesungguhnya, bukan pendidikan, bukan pendidikan setengah-setengah, atau melebih-lebihkan, sehingga merepotkan dan mungkin membuat pembelajaran jadi berantakan.

Intinya, pendidikan itu untuk semua orang, mutu pendidikannya juga yang bagus untuk semua orang. Semua orang mendapatkan itu harusnya, semua warga negara. Negara, dalam hal ini Pemerintah,

mestinya memperjuangkan kesetaraan mutu, kesamaan mutu kepada setiap orang. Tentu usahanya adalah mutu yang baik. Kalau ada kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, maka sekolah yang lebih jelek ditingkatkan mutunya.

Nah, intinya, pada dasarnya pendidikan harus setara kepada warga negara. Oleh karena itu, usaha ... usaha, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menghasilkan kesenjangan mutu pendidikan, itu harusnya dicegah atau dilarang.

Nah, saya berangkat dari situ. Saya mengidentifikasi bahwa Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional pada konsepnya, meskipun saya yakin niatnya baik tapi kita susah membuktikannya, bertujuan membedakan satu kelompok orang dari kelompok orang lainnya. Bahwa satu kelompok orang ingin dibuat lebih bagus. Entah karena dasarnya mereka lebih cerdas, entah karena mereka lebih kelihatan prestasinya lebih baik, dan sebagainya. Usaha itu disahkan atau bahkan dilegalkan dalam undang-undang dan undang ... pasal itu yang kemudian akan dipersoalkan di sini.

Nah, usaha seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan tadi yang saya bilang asumsi bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan setiap orang harusnya mendapatkan pendidikan yang mutunya baik, setara untuk semua orang.

Nah, Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional, ini bertujuan menghasilkan orang dengan kualitas yang berbeda dari yang lain. Apa dasarnya? Tidak terlalu jelas dalam undang-undang maupun dalam pembahasan banyak ahli dan Pihak Pemerintah. Saya jadi teringat, ini bukan bagian dari keahlian saya tapi saya tiba-tiba teringat, usaha-usaha beberapa pemimpin dunia yang terkenal kekejamannya untuk mengupayakan diciptakannya atau munculnya ras-ras unggul, seperti di Nazi Jerman dengan (suara tidak terdengar jelas), dengan usaha-usaha lain. Usaha untuk menghasilkan manusia unggul, yang lebih unggul, lebih baik daripada manusia lain. Nah, apa pun itu, tujuannya baik atau buruk, saya kira itu merupakan persoalan etis dan bisa melanggar etika. Berusaha menghasilkan manusia yang lebih unggul dari manusia yang lain.

Nah, kemudian ... jadi, secara konseptual bermasalah, kemudian juga mengenai pendidikannya. Dalam literatur psikologi pendidikan kontemporer, dalam riset-risetnya ditemukan bahwa pembentukan pemikiran, perolehan pengetahuan, peningkatan kompetensi, itu lebih optimal terjadi melalui interaksi dan dialog antara siswa, kalau kita bicara tentang sekolah, dengan rekan-rekannya yang lebih tinggi kemampuannya dan juga dengan guru atau fasilitator yang menjadi asisten. Guru bisa membantu memfasilitasi pembelajaran, rekan-rekan siswa yang lebih pintar atau lebih banyak pengetahuannya bisa membantu rekan-rekannya yang lebih sedikit pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kemampuan. Sementara si rekan-rekan itu sendiri, rekan-rekan yang lebih tinggi kemampuannya, dia

mendapatkan keuntungan dari latihan materi dari apa yang dia ajarkan. Kemudian, si siswa-siswa yang lebih rendah ini, dia nanti menginterelasi percakapan, dialog, dan pelajaran yang dia dapat waktu dia bersama-sama dengan rekan-rekan yang lebih ahli.

Dan kemudian, dengan interelasi pikiran itu, dia kemudian belajar. Justru sekarang ada usaha untuk melakukan membuat kelas-kelas multi age dan multi ability, artinya orang-orang dari umur yang berbeda dijadikan satu kelas dengan kemampuan yang berbeda juga. Karena di situ terjadi interaksi yang akan saling meningkatkan, tentu design dan metode pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa, rancang khusus supaya pembelajaran terjadi. Tapi kalau design-nya sudah bagus, metodenya sudah bagus kemudian dibandingkan mereka yang bergabung dengan teman-teman yang beragam kemampuannya dan mereka yang hanya belajar bersama orang-orang yang setara kemampuannya, maka yang beragam ini jauh lebih baik hasilnya. Jadi bahwa usaha untuk memfasilitasi, mendorong, dan menghasilkan orang-orang atau siswa-siswa yang lebih baik melalui satuan pendidikan bertaraf internasional justru jadi persoalan, yang ada nanti ... oke, yang ... yang ... yang kelihatannya mampu ... yang dinilai mampu, entah mampu dari keuangan maupun kemampuan, dia akan jadi lebih baik tapi yang lain makin tertinggal. Justru perpaduan pembauran mereka ini yang ... yang diperlukan untuk mengangkat yang lain, yang lebih sedikit kemampuannya sehingga lebih berkembang.

Nah, itu dari segi konseptual, satuan pendidikan bertaraf internasional ini bermasalah menurut saya. Kemudian dari segi praktiknya, memang ada banyak yang mengklaim bahwa sekolah ini berhasil, sekolah itu berhasil menerapkan standar bertaraf internasional. Banyak juga yang bilang kami tidak memungut biaya, kami menyediakan beasiswa. Kalau kita pakai penalaran induksi, mungkin dari 1.000 kasus, ada empat kasus yang berhasil sisanya tidak berhasil. Maka penalarannya sangat lemah dan itu musti dicek datanya secara lengkap, supaya kita bisa membuat kesimpulan yang lebih kuat. Nah, tapi problemnya dalam keseharian, dalam observasi, penelitian, dan pembicaraan dengan orang tua, ada banyak masalah di sana. Memang sekolah bisa bilang, "Kami tidak memaksa murid ini untuk mengikuti sekolah bertaraf internasional." Kalau untuk sekolah yang hanya membuka program bertaraf internasional, mereka juga bilang, "Kalau enggak sekolah, di sekolah kami enggak apa-apa, bisa pilih yang lain." Gitu. Tapi kita coba bayangkan kondisi psikologis dari si orang tua dan siswa, yang sudah mengantri mau masuk sekolah. Saya melihat betapa repot orang tua harus menyekolahkan anaknya. Sekolah biasa saja sudah mahal, apalagi sekolah dengan taraf internasional, lepas ada beasiswa atau tidak. Mereka repot sekali, begitu sudah diterima, wah diterima di SMP ini, di SD ini, di SMA ini. Lalu sampai di sana, anda harus ikut yang taraf internasional karena cuma ada di sini. Lho, terus apa konsekuensinya? Bayarnya lebih mahal. Aduh, kami enggak punya

duit. Ya, sudah, kami enggak bisa memaksa kok, anda bisa pindah tempat lain. Wah, orang tua akan merasa, ya sih ada pilihan, tapi sebenarnya dia diposisikan pada keadaan tanpa pilihan, dia tertekan. Dia sebagai orang tua yang mau bertanggung jawab pada anaknya, akan berusaha setengah mati, pakai pribahasa atau ungkapan orang Indonesia, Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, juga okelah gitu, yang penting anak sekolah.

Ini ada kekerasan yang halus, yang kalau dalam istilah Pierre Bourdieu disebut kekerasan simbolik. Kekerasan yang halus, yang membuat korban merasa dengan sukarela untuk menerimanya. Enggak apa-apa kan untuk kemajuan keluarga kita, untuk anak kita, dan sebagainya. Itu ... itu terjadi, akibatnya banyak. Waktu kerja orang tua lebih tinggi karena cari uang lebih banyak, kualitas interaksi dan hubungan dalam keluarga berkurang karena orang tua banyak berurusan dengan pekerjaan, macam-macam. Memang kalau ditanya, "Anda dipaksa?" Anda Cuma, "Enggak, enggak dipaksa." Tapi kalau kita lebih kritis melihatnya, itu ... itu problem. Lalu nanti bisa juga mereka yang memang tidak mampu, sudah enggak bisa kita ... ya sudahlah, cari sekolah yang tarafnya nasional saja, meskipun taraf nasional dibilang minimum, gitu, saya juga agak heran kenapa standar nasional pendidikan dibikin minimum.

Nah, orang-orang itu yang tidak bisa itu akan merasa, ya sudah memang kita enggak punya uang, kita enggak mampu, mungkin anaknya juga enggak terlalu pintar, enggak bisa dapat beasiswa, sudahlah kita terima kondisi itu. Memang dalam masyarakat ada perbedaan, ada yang lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih berhasil, lebih sukses, ada yang enggak. Kita terima saja kondisi ... nah, berfikir bahwa ada kotak-kotak itu jadi ... jadinya wajar. Orang pelan-pelan digiring untuk menerima status quo yang berisi ketidakadilan, yang di dalamnya mengandung berbagai macam perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya bukan alamiah tapi perbedaan karena struktur sosial memaksakan seperti itu dengan kebijakan atau undang-undang yang akhirnya memaksa orang membeda-bedakan. Pada anak pun begitu, anak juga akan berfikir, ya sudah kalau memang orang tua saya enggak mampu, ah, kalau dia sih dari orang kaya, dia dari orang lebih pintar.

Paradoksnya lagi dalam pendidikan Indonesia, khususnya satuan pendidikan bertaraf internasional, ini bisa membuat orang jadi tidak berdaya. Untuk bisa pintar sekolah ... di sekolah yang baik, saya harus punya modal, padahal modal itu yang saya enggak punya. Kami sekolah untuk mendapat modal, dapat penghasilan lebih bagus, kok harus punya modal dulu, lingkaran setan. Ya, sudah memang orang miskin, miskin terus. Enggak bisa membangun keluarga lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik, sebab enggak punya modal. Nah, saya kira pada dasarnya dan pada praktiknya, persatuan pendidikan bertaraf nasional punya banyak masalah. ada banyak rincian di sini, tapi karena kalau panjang saya kira poin-poin yang, yang saya sampaikan tadi cukup sampai di situ

dulu. Mungkin kalau ada kebutuhan untuk menambahi informasi dan sebagainya, saya bersedia untuk dimintai kesaksian.  
Terima kasih, selamat siang.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, berikutnya siapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ya. Silakan, Ibu.

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Siapa? Ahli?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ahli, Yang Mulia. CV-nya sudah kita kirim via email, Pak. Ada juga (...)

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ini, ini siapa?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ibu Itje, Itje Khadijah.

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oh, sudah ada ini. Sudah ada.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Silakan Ibu.

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sudah di sumpah ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Sudah di sumpah juga, kemarin.

57. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Itje Khadijah, ini ya CV-ya. Kirain Ibu Sri Mulyani tadi. Silakan, Ibu.

58. AHLI DARI PEMOHON: ITJE KHADIJAH

Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Bahan Power Pointnya juga sudah disiapkan.

60. AHLI DARI PEMOHON: ITJE KHADIJAH

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO

Ya, silakan Ibu Ibu Itje.

62. AHLI DARI PEMOHON: ITJE KHADIJAH

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, berkenankan dalam kesaksian saya hari ini memulai dengan apa yang saya yakini melalui agama saya bahwa sebagai seorang dewasa, terutama orang yang berpendidikan. Saya merasa ada larangan yang keras untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Yang kedua, saya mengacu kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan saya sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan hal tersebut.

Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik saya meyakini bahwa pekerjaan saya mendidik adalah memberikan kemampuan kepada umat manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga apabila ada yang salah ... usia mereka tidak akan kembali.

Perjalanan panjang saya menelusuri dikembangkannya program SBI/RSBI dan menjadi bagian dari prosesnya, terutama dalam pelatihan-pelatihan guru membuat saya semakin melihat dengan jelas bahwa kedudukan undang-undangnya sampai pada proses belajar mengajar di kelas mengandung kejanggalan-kejanggalan yang merugikan masyarakat pengguna pendidikan. Sebuah dokumen atau undang-undang terbukti tepat atau tidaknya adalah pada saat di implementasikan. Apalagi jika itu mengatur pendidikan yang langsung menyangkut kehidupan manusia, hasil dari produk hukum yang menyangkut pendidikan hanya akan terlihat setelah anak berperan dalam kehidupan luas, bukan sekedar

ketika mereka lulus dari sekolah atau memenangkan berbagai kejuaraan saja.

Keterlambatan dalam menganalisa produk hukum yang menyangkut pendidikan anak pada usia sekolah berakibat fatal. Karena perkembangan setiap individu tidak dapat ditarik mundur untuk diperbaiki. Tujuan yang tertera pada undang-undang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus diuji dari implementasi dan output yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar pada tataran dokumen. Dalam hal ini saya menggaris bawahi sekolah-sekolah yang mendapatkan pembiayaan langsung dari dana negara melalui RAPBN maupun RAPBD.

Oleh sebab itu, undang-undang yang menyangkut pendidikan di implementasikan sebelum undang-undang itu di implementasikan secara luas, seharusnya dilakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut dalam scup yang kecil dan dilakukan analisa cermat tidak sekedar tambal sulam. Perlu di ingat bahwa ketika kita berbicara SBI/RSBI ini, kita berbicara secara nasional yang secara geografis kita sadari bahwa letak Indonesia ini begitu beragamnya. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah secara nasional, bukan satu sekolah ke satu sekolah. Dalam laporan John Clegg, yaitu seorang peneliti yang diangkat ... yang dibawa oleh British Council ke Indonesia atas penelitiannya pada tahun 2007 tentang SBI disampaikan bahwa sebaiknya program SBI ini diselenggarakan terlebih dahulu dalam jumlah yang dapat dikendalikan, yaitu dalam jumlah sepuluh sekolah misalnya. Kemudian, sekolah tersebut menjadi contoh sekolah-sekolah lain yang ada disekitarnya dan sebelumnya sekolah-sekolah tersebut harus dipantau secara ketat dalam penyelenggaraannya.

Sejak dikeluarkannya kebijakan SBI/RSBI, saya ingat bahwa tadinya tidak ada R-nya itu, SBI itu hanya SBI saja. Namun, kemudian di dalam praktiknya belum sampai pada titik yang mungkin ... memungkinkan untuk SBI, maka kemudian ada keluar R-nya, rintisan. Saat ini terdapat lebih dari 1.100 sekolah dengan predikat ini. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah sudah ada kajian cermat yang menunjukkan bahwa upaya mencerdaskan kelompok kecil anak-anak yang memang sudah cerdas ini melalui sekolah SBI/RSBI benar-benar berdampak signifikan terhadap output-nya. Membicarakan apakah undang-undang mengenai SBI/RSBI tepat atau tidak, tidak bisa dilakukan hanya sekedar pada tataran dokumen undang-undangnya. Hal itu bagaikan menggambar di atas air, tetap harus dilakukan tinjauan aplikasi secara menyeluruh dan luas.

Saya memberikan gambar seperti ini, perjalanan antara Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sampai pada kegiatan di ruang kelas adalah perjalanan yang sangat berliku, menanjak, dan begitu sulitnya. Kenapa? Karena kita berbicara proses mendidik anak, yang tidak cukup dengan sekedar menunjukkan dokumen-dokumen saja bahwa ini sekolah sudah ter-ISO, dan sebagainya, tetapi menyangkut bagaimana proses di

dalam kelas ketika guru mengajar, itu yang menjadi utama yang meningkatkan kualitas. Dan di situ saya berikan gambar kecil yang dilihat dari kaca mata undang-undang maka terlihat lebih sederhana, padahal perjalanan sebenarnya tidak sesederhana itu.

Jika pada kesaksian sebelumnya oleh Ahli disampaikan bahwa RSBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, faktanya mari kita hitung lebih banyak yang mana jumlah anak yang sudah cerdas, dan akan lebih dicerdaskan dibandingkan dengan jumlah anak yang terpaksa tidak tercerdaskan karena faktor geografis karena faktor keturunan atau kecerdasan, dan karena faktor finansial? Sehingga sebenarnya pengelompokan ini menurut saya membuat anak-anak yang punya kesempatan untuk muncul menjadi cerdas tidak muncul.

Pada slide selanjutnya, saya melihat kelompok anak-anak dimana satu kelas ... foto-foto yang saya tunjukkan adalah yang saya ambil sendiri. Foto-foto yang di sekolah yang kurang dapat akses dengan keadaan kelas yang sederhana, dua kelas dijadikan satu. Sedangkan satu lagi adalah kelas yang sangat istimewa. Apakah sama sebenarnya hak mereka dalam hal ini? Kasat mata saja saya melihat bahwa anak-anak ini tidak mendapatkan haknya secara merata.

Disampaikan juga bahwa RSBI adalah untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus karena kecerdasannya lebih tinggi dibanding dengan rata-rata anak lainnya. Saya perlu pertanyakan, ukuran apa yang digunakan? Bagaimana dengan jumlah anak yang putus sekolah? Adakah mungkin di antara mereka terdapat anak-anak yang juga cerdas yang secara tidak langsung terbunuh kecerdasannya? Dalam pengalaman saya menangani anak-anak putus sekolah yang ada di jalanan, banyak sekali mereka yang cerdas dalam menghadapi hidupnya, hanya mereka memang tidak tertampung secara formal di lembaga-lembaga pendidikan.

Bagaimana dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mengisyaratkan dijaminnya hak untuk mendapatkan pengajaran bagi seluruh warga negara, terlebih pada usia wajib belajar? Saya katakan kalau kelas anak-anak SD dan SMP di seluruh Indonesia belum tertampung di sekolah, pantaskah kita kemudian memberikan kelebihan-kelebihan kepada sejumlah kecil sekolah untuk memberikan kualitas yang lebih baik?

Pada gambar selanjutnya, saya mengambil salah satu sekolah di Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang mana di sekolah tersebut hanya ada satu guru yang mengajar dari kelas 1, kelas 6 dengan kondisi kelas seperti itu. Kemudian di sebelahnya adalah tentu saja kelas RSBI. Dengan adanya pengakuan melalui undang-undang bahwa sekolah SBI adalah sekolah bermutu, maka bagi saya bisa menafsirkan secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa sekolah yang tidak masuk golongan ini adalah sekolah tidak bermutu.



Bukti bahwa penyusunan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) tidak diawali dengan riset lapangan yang cermat adalah masih banyak kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memulai program ini. Apakah sudah ada hitungan yang dapat memprediksi kapan seluruh kabupaten dan kota di tanah air memiliki sekolah bermutu RSBI? Dan apa dampaknya terhadap sekolah-sekolah di sekitarnya yang bahkan belum berstatus SSN sekali pun?

Ini adalah sekolah-sekolah yang saya tidak tahu statusnya apa, kalau mau disebut SSN, mereka bilang, "Bukan, Bu, bukan sekolah SSN." Ini adalah sekolah di Tana Toraja, sekolah di Maluku, sekolah di Kabupaten Kaur, dan sekolah di Riau. Keempat-empatnya adalah sekolah-sekolah yang pernah saya kunjungi dan ... dan dalam kapasitas saya sebagai pendidik saja bukan sebagai apa-apa.

Bukti bahwa penyusunan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) tidak diawali dengan riset lapangan yang cermat adalah adanya ketentuan yang berubah-ubah. Ini saya ikuti betul sebagai seorang praktisi di lapangan. Dalam menerjemahkan kata internasional, banyak sekali sekolah yang datang kepada saya minta bantuan untuk menerjemahkan what is international? Terjemahan yang paling banyak dianut adalah mengajarkan matematika dan IPA dalam dua bahasa. Hampir semua sekolah yang saya temui menerjemahkan bahwa proses belajar-mengajar dengan menggunakan dua ... dua bahasa, yang saat ini akhirnya menjadi ketentuan adalah bukti keinternasionalan.

Pada slide berikutnya saya ambil paparan bapak wamen pada simposium SBI tahun lalu. Yang mengatakan bahwa di situ ada klausul, teaching and learning of math and science and vocational subject conducted both English and bahasa Indonesia, kemudian ... di sekolah RSBI maupun di SBI. Karena ini paparan pak wamen jadi ya, saya percaya ini. Kemudian pada berikutnya baru saya temukan di laman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada bagian program kerja yang berjudul, Program Kerja Pendidikan Guru Bertaraf Internasional Bidang MIPA, dinyatakan pada salah satu persyaratannya adalah guru mampu melaksanakan proses belajar-mengajar dalam bahasa Inggris secara efektif dengan diberikan angka TOEFL 500, saya pikir ini adalah naif sekali untuk tidak tahu bahwa sekarang TOEFL itu tidak ada yang angkanya 500 karena pada slide berikutnya, saya ambil bukti dari ETS yang menunjukkan bahwa saat ini sejak tahun 1998, nilai TOEFL itu yang ratusan-ratusan, 600, 667, tidak ada. Karena TOEFL itu sudah berubah pada tahun 1998, kemudian menjadi pre ... menjadi online pada tahun ... sampai 2005 yang skornya hanya 0-300. Dan dari 2005 sampai saat ini, 2005 sampai saat ini yang ada namanya TOEFL IBT yang nilainya paling tinggi 120. Nah ini kalau kita terus menggembor-gemborkan bahwa TOEFL 500, TOEFL 500, what this means? Tidak ada.

Kami pada saat itu juga memberikan penjelasan kepada kementerian yang lain tentang hal itu karena ada disampaikan di media. Bahwa TOEFL bukanlah ukuran untuk melihat bahwa seseorang mampu ... sebelumnya, Pak! Bahwa seseorang mampu mengajar atau melaksanakan proses pengajaran di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Inggris karena TOEFL adalah to access ability to communicate successfully in an academic setting in English speaking countries. Jadi adalah TOEFL adalah tujuannya untuk membuat orang mampu belajar di negara-negara berbahasa Inggris, sehingga dia bisa mampu mengikuti secara konsep ketika dia belajar di negara-negara tersebut. Sehingga untuk hal ini, saya melihat persyaratan itu menjadi tidak tepat sebenarnya.

Pengujian guru dalam mengajar Bahasa Inggris maupun mata pelajaran lain dalam bahasa Inggris, tidak dapat diukur dengan nilai TOEFL yang tidak jelas kevalidannya, apalagi TOEFL 500. Jadi mohon ini menjadi perhatian.

Menurut saya, seharusnya dituntaskan terlebih dahulu pemenuhan kewajiban pendidikan dasar karena sekolah-sekolah yang saat ini mendapat dukungan sumber dana dan sumber daya dari pemerintah melalui sekolah RSBI, sebelumnya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah unggul mutunya, sehingga pemberian status SBI/RSBI hanya sedikit saja menambah polesan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Yang nampak menonjol saat ini hanya segi fasilitas fisik, walaupun ada penambahan-penambahan sedikit dari segi kualitas, tetapi yang diterima memang anak-anak yang sudah berkualitas.

Terdapat kejanggalan dalam sistem dan alat yang digunakan pada proses penerimaan dan evaluasi akhir. Untuk masuk ke sekolah-sekolah RSBI/SBI, siswa harus mengikuti berbagai sistem saringan karena apalagi mendengarkan tadi paparan dari SMP 1 Magelang bahwa dari jumlah 100 sekian yang diterima ada sekian ... 500 yang mendaftar, maka otomatis yang ditarik adalah kelompok-kelompok sarinya.

Oleh sebab itu, mereka memang anak-anak yang sudah di ... patut dikelompokkan demikian. Namun untuk lulus, mereka hanya diuji dengan alat yang sama dengan anak-anak di sekolah satu atap, yang syarat akan miskinnya sumber daya dan pengembangan. Sehingga dalam hal ini, jelas kalau anak-anak itu menjadi unggul dari anak-anak yang lain. Memang patut karena mendapat dukungan yang lebih. Dengan maraknya penggunaan ... dengan maraknya pengajaran menggunakan dua bahasa di sekolah-sekolah RSBI ini, sebetulnya British Counsel Indonesia beberapa kali mengadakan penelitian di sejumlah sekolah, serta berba ... berbagai dokumen yang terkait untuk melihat apakah hal ini akan dapat dilaksanakan secara tepat.

Dua simposium juga digelar di Jakarta pada tahun 2010 dan 2011. Peneliti yang telah melakukan adalah John Clark seorang pakar bidang pendidikan bilingual dari Inggris dan beliau termasuk salah satu pakar yang juga membantu Malaysia pada saat itu. Perlu diingat bahwa

Malaysia secara kenegaraan, secara ... secara nasional telah ... telah mengubah kebijakannya untuk tidak mengajarkan math and science dalam bahasa Inggris di seluruh negeri. Jadi mereka telah melakukan seleksi lebih ... lebih se ... lebih teliti lagi. Haywel Comand [Sic!] seorang ahli pendidikan dari Inggris dan Ibu Nilawati dari Universitas Atma Jaya Jakarta. Hasil penelitian sudah kami kopi sebanyak 12 kali, dan kami akan tinggalkan supaya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Kesimpulan para peneliti tersebut menyampaikan bahwa penerapan bilingual di sekolah-sekolah Indonesia memerlukan pembenahan yang menyeluruh dalam unsur sumber daya pengajar dan bahan ajar. Hasil penelitian telah dibukukan melalui dua kali simposium yang membahas RSBI, utamanya menyangkut penggunaan bilingual dalam proses belajar-mengajar. Karena bahasa Inggris menjadi icon di sekolah-sekolah SBI/RSBI, maka kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar terutama Matematika dan IPA menjadi penting. Pengembangan materi ajar dalam dua bahasa juga tidak dapat dielakan. Namun kenyataannya sampai saat ini kompetensi guru Bahasa Inggris sebagai tolak ukur kemampuan menggunakan bahasa Inggris bagi guru mata pelajaran lain masih pada kategori yang secara umum rendah. Hal ini bisa saya buktikan melalui data statistik, maupun pengalaman saya di lapangan yang sehari-hari bertemu dengan guru-guru, terutama guru-guru Bahasa Inggris.

Sampai bulan April ini saya sudah bertemu lebih dari 50 ... 5000 guru untuk ... untuk ... untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang kadang-kadang menyakitkan hati karena cuma diberi pelatihan dalam waktu setengah hari, dua jam, dan seterusnya. Dalam statistik ini terlihat bahwa pengujian terhadap lebih dari 1.300 guru Bahasa Inggris ditemukan bahwa kemampuan guru Bahasa Inggris hanya pada sampai tingkat intermediate. Mengajar pada Bahasa Inggris dengan kemampuan equivalent intermediate adalah terlalu rendah untuk Guru Bahasa Inggris yang bertugas memampukan Siswa menggunakan Bahasa Inggris pada umumnya pada level rata-rata yang ada tersebut Guru mampu berkomunikasi untuk kepentingan bersosialisasi. Nah, apabila Guru Bahasa Inggris pada level ini bagaimana dengan Guru mata pelajaran lain pada slide berikutnya statistik menunjukkan bahwa pengujian terhadap lebih dari 3000 Guru yang mengajar pelajaran lain yang diuji Bahasa Inggrisnya maka kemampuannya pada level terendah yaitu level novice. Level novice ini penjelasannya apa? Penjelasannya adalah they can not read full sentences, bahkan membaca kalimat secara penuh saja tidak bisa, at this level material likely have to be re read, orang untuk memahami satu kalimat saja harus membaca berulang-ulang, should not be expected to participate as a full partner in even simple face to face conversation, bahkan di dalam ngomong saja mungkin banyak sekali ketidaksambungan antara dia dan orang lain. Comprehention vocabulary

we likely be limited to topic of immediate need jadi hanya yang dilihat saja yang bisa dilakukan.

Selanjutnya, padahal Para Guru dengan kemampuan novice untuk menjadi mampu menggunakan Bahasa Inggris sebagai alat pengajaran bidang lain yang disebut kognitif academic language proficiensy memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun untuk dapat mampu mengajar dalam bahasa asing secara baik dalam artian bukan hanya sekedar membuka kelas, memberi instruksi, bukan itu tetapi lebih pada bagaimana mengaktifkan kognitif academic language anak. Sedangkan untuk basic interpersonal communication skill dapat dikuasai dalam waktu singkat 6 bulan hingga 2 tahun. Ini adalah salah satu (suara tidak terdengar jelas) adalah salah satu yang saya kutip tetapi banyak sekali pakar yang mengatakan hal yang sama. Upaya yang saat ini kerap dilakukan yang dianggap dapat memampukan Guru, yang dianggap karena dalam hal ini keahlian saya adalah pada pelatihan Guru maka saya melihat sementara ini pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Guru-Guru kita belum sampai pada membisakan mereka tetapi baru dapat memberikan pengetahuan kepada mereka.

Pertama, mengirim Guru untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris jangka pendek yang apabila ... kalau dipikir menkursukan Guru 6 bulan itu nanti sudah bisa ngajar pakai Bahasa Inggris padahal itu sangat tidak cukup. Mengikutsertakan Guru pada pelatihan yang bersifat sporadic yang menurut saya seharusnya dilakukan pelatihan secara cermat sesuai dengan kebutuhan untuk memampukan anak berpikir bukan hanya memampukan anak-anak menang lomba olimpiade.

Jika ada pelatihan gabungan rata-rata jumlah pesertanya melebihi kapasitas pelatihan untuk skill berkisar 50-100 bahkan saya pernah dihadapkan pada 200 Guru di satu provinsi untuk bisa mengajar dalam Bahasa Inggris dan itu dari SD, SMP, SMA, SMK. Waw saya bilang, "Kalau saya pikir pekerjaan ini saya serahkan kepada pelatih unggul dari negara lain sekalipun dia tidak akan bisa melakukannya" karena di dalam 5 hari saya diminta membisakan lebih dari 100 orang untuk ngajar pakai Bahasa Inggris ketika dia saya ajak ngomong how are you today i'm fine saja susah, dan hal ini yang menurut saya patut menjadi perhatian yang sangat mendalam dari pemerintah.

Dalam hal ini seolah-olah unsur kemampuan berbahasa adalah satu-satunya yang diperlukan padahal ada unsur pedagogi dalam mengajar bidang lain dalam bahasa asing yang tak kalah pentingnya misalnya tehnik merangsang berpikir dalam Bahasa Inggris, sudah kah teman-teman Guru dalam Bahasa Indonesia melakukan hal tersebut sehingga kemudian bisa mentransferkan itu dalam Bahasa Inggris. Kemudian tehnik memancing Siswa untuk menggunakan apa ... menyampaikan kembali apa yang diajarkan dan seterusnya. Meminta Siswa untuk mampu bertanya adalah sesuatu yang tidak sulit, sorry, sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan kemampuan berbahasa yang terbatas. Even ketika Bahasa Indonesianya pun itu tidak

mudah karena di lapangan banyak saya lihat. Bagaimana dengan bahan ajar? Bahan ajar saya ambil contoh di tiga dari tiga mata pelajaran, mata pelajaran Matematika, mata pelajaran IPA, mata pelajaran Bahasa Inggris.

Silakan slide berikutnya. Slide ini adalah saya ambil dari Kelas 7 SMP, SMP Kelas 1 semester 1, ini adalah buku pelajaran IPA yang mana di sebelah kiri ada dalam Bahasa Indonesia, di sebelah kanan ada dalam Bahasa Inggris. Kalau saya jadi murid lah ngapain saya repot-repot melihat Bahasa Inggrisnya saya akan melihat Bahasa Indonesianya, dan ini yang paling disukai sekolah karena tidak merepotkan Guru yang mengajar secara bilingual, dan kalau kita lihat tingkat Bahasa Inggrisnya it's perfectly translation from Bahasa Indonesia to English, dan syarat akan kesalahan. Saya bisa menunjukkan berbagai kesalahan ketika nanti diperlukan, ini adalah Kelas 1 SMP perlu diingat di SD belum ada aturan bahwa Bahasa Inggris adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar, Bahasa Inggris saat ini adalah muatan lokal secara nasional belum menjadi pelajaran wajib sehingga untuk anak SMP Kelas 1 dihadapkan pada hal demikian ini menurut saya terlalu menaifkan ketidakadaan.

Kemudian yang berikutnya adalah contoh Matematika dimana di situ diterjemah 100% dan teman-teman saya yang sering mengajar privat RSBI mengatakan, "Bu Itje ini apa ya bu ya, kok anak-anak SMP kelas 1 disuruh belajar kaya gini, bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya rem sama bahasa Inggrisnya ini, itu banyak yang salah dalam teknis." Ya saya bilang itulah keadaannya. Lantas secara kontradiktif, pelajaran bahasa Inggrisnya, berikutnya. Karena guru bahasa Inggris atau orang-orang yang menulis materi bahasa Inggris menganut bahwa di SD itu belum ada pelajaran bahasa Inggris maka pelajaran bahasa Inggrisnya sesimpel ini, how are you today, I am fine thank you, what is your name? gitu.

Jadi ini perlu menjadi bahan pemikiran bagi kita semua agar kita mampu menyediakan anak-anak yang mampu hidup di zamannya, bukan hanya mampu menang di lomba-lomba saja.

Berikutnya, ditinjau dari segi pedagogi pengajaran dalam dua bahasa penerjemahan menimbulkan kebingungan bagi anak dalam berpikir. Apakah isi yang harus dikuasai atau bahasa? Bahasa ... ingat, bahasa adalah alat berpikir. Pada saat kita menyampaikan sesuatu kita memutuskan di otak kita, bahasa apa yang kita pakai untuk menyampaikan sesuatu yang sedang kita pikirkan. Saya itu lebih gampang loncat dari bahasa Inggris ke bahasa Malang sebenarnya, daripada ke bahasa Indonesia.

Lantas, salah kaprah menggunakan bahasa Inggris seperti ini, tiada hari tanpa belajar, no day no learning, no learning no day. Bayangkan ini saya bertemu puluhan yang kaya begini. Ini nangis saya pas kalau datang ke sekolah diundang, dengan bangga saya diundang oleh sekolah RSBI untuk datang, terus melihat yang kaya begini. "Oh, goodness. Brave!" Kemudian di situ, aku malu datang terlambat, I am a

shame. Capailah cita-citamu setinggi langit, reach you apa itu, your aspiration in is a sky high, what is it? Dan masih banyak lagi yang saya punya, yang saya simpan memang saya dokumentasikan untuk kepentingan mendidik anak-anak Indonesia.

Lantas selanjutnya, ketika melihat kurikulum internasional. Tapi jangan salah kalau kita ke sekolah, kepala sekolah senang sekali karena di sekolahnya sudah banyak pengumuman pakai bahasa Inggris. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi keprihatinan secara nasional.

Kurikulum internasional apa itu? Di banyak negara sekolah-sekolah berkelas dunia (world class school), the world class school itu digunakan di banyak tempat. Jadi saya pikir pada saat pertama kali saya mendengarkan bahwa world class school itu tidak ada, ada. Justru orang tidak menggunakan internasional karena istilah internasional digunakan untuk sekolah-sekolah yang menampung anak-anak dari berbagai kewarganegaraan. Makanya kalau di Jakarta International School itu menampung anak-anak dari berbagai warga negara dan sekolah-sekolah di Inggris yang disebut international school adalah anak-anak imigran yang belum bisa berbahasa Inggris maka mereka harus masuk ke international school itu terlebih dahulu atau sekolah-sekolah swasta yang memang sengaja dibuat sangat elit dengan menggunakan apa yang disebut IB.

IB atau International Baccalaureate di Indonesia sudah ada 36 sekolah International Baccalaureate yang membeli lisensi dari International Baccalaureate dan semuanya adalah sekolah swasta. Yang memang layak-layak saja kalau swasta mah karena itu memang di danai sendiri.

Yang dipahami sekolah RSBI kurikulum ... kurikulum internasional adalah Cambridge, padahal itu adalah kurikulum untuk tes yang dijual oleh salah satu unit pelayanan dari University of Cambridge dan bukan dari sistem universitas Cambridge. Tetapi adalah Cambridge International Examination Centre.

Saya dua minggu yang lalu jalan-jalan di Sidoarjo ada plakat besar sekali. Telah dibuka sekolah la, la, la, dengan menggunakan kurikulum Cambridge, saya pikir ini apa ya. Perlu kita ingat bahwa internasional adalah kualitas bukan status. Internasional adalah kualitas. Dulu walaupun tidak bersekolah dengan sekolah berstatus internasional banyak kita yang bisa berperan secara internasional.

Pada era ini jika sekolah tidak menyiapkan anak untuk bisa berpartisipasi. Saya lihat dokumen kita banyak yang berkompetisi, padahal yang harus kita lakukan adalah lebih banyak berpartisipasi.

Apabila sekolah-sekolah di Indonesia tidak menyiapkan anak berpartisipasi secara internasional dan mendunia, mau selevel apa? Level RT? Level camat atau apa? Karena dunia kerja saat ini menyediakan ... tersedia untuk anak-anak yang mampu berpartisipasi secara global.

Berikutnya. Pada gambar ini saya mecip ... mengambil satu ... satu sekolah. Dua sekolah dengan fasilitas yang sangat berbeda. Apakah ini yang dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945?

Apakah ... berikutnya, pada gambar berikutnya. Anak-anak yang mendapatkan fasilitas ini dan anak-anak yang mendapatkan di kelas yang pojok itu, itu di satu bangku ada empat anak dan di situ satu guru menangani tiga kelas, kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Satu guru lagi menangani kelas empat, lima, enam, dan kelas itu digunakan dua kali. Paginya buat kelas satu, dua, tiga, ya ada tiga lokal. Sorenya kelas empat, lima, enam. Jangan lupa, mereka akan diuji dengan alat uji yang sama yaitu ujian nasional saja.

Berikutnya, pada gambar berikutnya. Ini adalah salah satu sekolah di Jakarta dan yang berikutnya adalah salah satu sekolah di Timika yang jaraknya tidak jauh dari Freeport. Di situ saya berdiri itu adalah jembatan yang saya lewati untuk menuju sekolah ini. Dan di dalamnya di sekolah ini hanya terdapat bangku-bangku seperti itu, gantian dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya pikir ... dan ini adalah sekolah milik negara ya karena ada ... ada tulisannya di sana.

Nah, apabila ini yang menjadi perhatian kita, patutkah kita masih memikirkan untuk menghabiskan lebih banyak dana kepada sekolah-sekolah yang kita sebut sekolah RSBI tadi. Selanjutnya, tentu saja anak-anak ingin menjadi beruntung, ingin menjadi berarti hidupnya dan sekolah adalah tempat masyarakat mempersiapkan hidup.

Lanjutnya. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya yang pertama adalah undang-undang yang menyangkut sekolah tidak dapat dievaluasi pada tataran dokumen tanpa menyentuh implementasi dan output, tidak mungkin. RSBI, SBI, dilandasi oleh undang-undang yang tidak berpihak kepada keadilan dalam perolehan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang merata. Karena persiapannya yang kurang cermat, maka evaluasi dan perbaikannya ... perbaikan penyelenggaraan SBI, RSBI, sporadis, tidak holistik, dan cenderung membuat sekolah menerjemahkan kata internasional dengan bahasa Inggris dan keterampilan-keterampilan ekstrakurikuler lainnya.

Berikutnya. Jika dilihat dari praktek pelaksanaan proses penyelenggaraan program RSBI, maka muncul persepsi bahwa program ini merupakan kebohongan publik. Karena masyarakat yang mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah RSBI, sebagian besar hanya mengerti bahwa RSBI membedakan anak-anak mereka dari kelompok anak-anak yang lain yang tergolong kurang cerdas tanpa kritis terhadap proses pembinaan berbagai aspek kecerdasannya. Yang banyak dituntut orang tua saat ini adalah transparansi sistem keuangan, bukan sistem pendidikannya.

Bagi kebanyakan anak Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua setelah bahasa ibu. Dalam jangka waktu tertentu, posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dikhawatirkan akan menjadi bahasa kaum bawah yang membedakan mereka dari anak-anak dari kelompok elite terpelajar.

Saya mohon diizinkan untuk mengakhiri kesaksian saya ini, melihat gambar selanjutnya yang ... mari kita berhenti melihat

pendidikan di Indonesia, sebagaimana orang buta meraba gajah. Mari kita lihat secara holistik bahwa kita menyiapkan anak-anak Indonesia yang akan mengemban amanah Undang-Undang Dasar dan Pancasila pada zaman mereka, bukan saat ini.

Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualikum wr. wb.

63. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Saudara Itje, Saudara sebelum dilanjutkan, saya mengajak kita semua mengheningkan cipta, berdoa untuk kepergian Ibu Menteri Kesehatan, satu jam yang lalu, Ibu Sri Rahayu Setianingsih. Mengheningkan cipta dan berdoa mulai. Selesai.

Baik. Nampaknya sidang tidak bisa diakhiri hari ini, sehingga harus dibuka sidang lagi. Meski begitu, untuk tidak kehilangan momentum dari isu-isu penting tadi yang disampaikan oleh para saksi dan ahli. Sampai jam 13.00 WIB, kita akan melakukan ... apa namanya ... minta penjelasan-penjelasan atau klarifikasi, tanya-jawab, gitu. Karena mungkin yang hadir hari ini, pada sidang berikutnya tidak dihadirkan lagi oleh yang membawa.

Maka saya persilakan, kalau ada yang ... Majelis Hakim? Pak ... atau Majelis Hakim terakhir saja. Ada dari floor yang ingin memperdalam apa yang disampaikan tadi, baik Pemohon maupun Pemerintah? Silakan.

64. PEMOHON: FERDI HENDRI ANTONI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya, saya ajukan pada dua kepala sekolah. Pertama, berapa anggaran sekolah, baik itu yang diterima dari APBN, APBD, dan komite sekolah? Berapa iuran bulanannya? Dan kemudian, jika yang diterima itu adalah siswa cerdas dan semuanya miskin, artinya sekolah tidak bisa menarik pungutan, apa yang akan dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah? Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Ada lagi, biar ditampung dulu?

66. PEMOHON:

Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Kepala Sekolah di SMP Magelang 1. Saya mau tanya, Pak, berapa banyak anak-anak yang ... anak-anak terdekat di sekolah yang di sekolah tempat Bapak? Itu saja, Pak. Terima kasih.



67. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Berapa anak yang dekat dengan sekolah itu rumahnya, bersekolah di sekolah yang Bapak kelola? Dari Pemerintah, ada? Tidak ada. Baik. Saya persilakan kepada saksi yang ditanya tadi dari Magelang. Silakan, Pak.

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan berapa anggaran sekolah? Anggaran sekolah kami kurang lebih Rp3 miliar. Di mana hampir Rp2 miliar lebih itu adalah gaji guru dan karyawan kami. Adapun dari pusat, kami menerima bantuan Rp130 juta satu tahun. Dari Provinsi Jawa Tengah, kami menerima bantuan Rp400 juta, dan dari Kota Magelang ... Pemerintah Kota Magelang kami menerima kurang lebih Rp100 juta. Sehingga bulanan kalau dibuat rata-rata sumbangan-sumbangan itu kurang lebih Rp100.000,00.

Uang masuk di sekolah kami itupun juga merupakan sumbangan karena sumbangan berarti terserah dari orang tua, kalau di rata-rata ada yang Rp1.000.000,00, ada yang Rp500.000,00, dan bahkan juga hampir 47 anak atau siswa itu tidak memberikan sumbangan. Bagaimana untuk anak atau siswa yang cerdas dan kemungkinan itu semua miskin, pasti itu diterima semuanya karena kami tidak pernah menseleksi bahwa siswa itu mampu atau tidak. Kami menseleksi berdasarkan kompetensi siswa karena kami sudah dibantu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Magelang. Sehingga sumbangan itupun juga kami sesuaikan. Sumbangannya berapa, dana yang ada berapa, itulah yang kita optimalkan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada anak-anak. Untuk anak-anak kami memang menyeluruh, mulai dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung ada beberapa. Penyebarannya luar biasa, tetapi setelah kami rekap kurang lebih 60% itu tetap anak-anak Kota Magelang, yang dekat dengan sekolah karena apa? Karena Kota Magelang itu wilayahnya sangat sempit sekali. Adapun 40% bahkan kurang itu adalah anak-anak yang di luar Kota Magelang. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup? Baik, sekarang Majelis ... masih ada lagi? Oh, silakan.

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SOLIKHIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau tadi ditanyakan berapa anggaran dalam satu tahun, kami tidak bisa menjawab karena tidak bawa catatan. Kami ingin sampaikan, takutnya nanti salah. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa anggaran yang diterima untuk anak dengan biaya

operasional, itu sama dengan yang diterima oleh sekolah regular maupun SSN melalui dana BOP dari Pemda DKI Jakarta dan dana dari BOS. Nah, untuk penambahan-penambahan sarana dan prasarana di sekolah kami, betul kami terima dari APBN pada tahun pertama dan tahun kedua ketika RSBI itu dilaksanakan karena kami ... RSBI itu ditetapkan tahun 2007, itu untuk melengkapi sarana yang ada seperti kami membangun laboratorium komputer, kami membangun laboratorium bahasa, memang itu sarana pembelajaran. Kemudian tadi ditanyakan, bagaimana kalau yang diterima atau semua anak cerdas dan miskin. Kami tidak mau berandai-andai, yang ada di depan kami itulah yang kami laksanakan. Tetapi di dalam aturan, memang kami diminta untuk menerima 20% anak miskin dan berprestasi dan kalau bisa lebih bagi kami tidak masalah. Sudah kami jelaskan di depan bahwa kami tidak hanya menggalang dana dari orang tua, tetapi kami juga bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam melengkapi berbagai sarana yang ada di sekolah kami. Terima kasih, Yang Mulia.

71. PEMOHON: FERDI HENDRI ANTONI

Maaf, Yang Mulia, bisa dipertanyakan lebih lanjut?

72. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

73. PEMOHON: FERDI HENDRI ANTONI

Oke, bisa enggak dibuat persentase? Dari APBN berapa persen, APBD berapa persen, dari orang tua murid berapa persen, dan dari pihak ketiga CSR berapa persen?

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SOLIKHIN

Seperti yang kami jelaskan, kami tidak mempersiapkan itu tapi ada di kami, itu. Tetapi yang perlu kami sampaikan tadi bahwa untuk biaya operasional setiap bulan, itu sama dengan sekolah-sekolah regular. Dan tadi lupa saya, ada pertanyaan, uangnya berapa perbulan. Yang disampaikan begitu. Kami mulai dari nol, nol% seperti kami tadi sampaikan di hadapan Yang Mulia bahwa ini ada orang tua saksi kami, dari orang tua yang memang seluruh pembiayaan anaknya peserta didik kami, kami yang menanggung, kami yang membiayai. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami mengandung ... menganut sistem subsidi silang. Jadi kalau dikatakan berapa? Apakah semua sama? Saya katakan tidak sama. Tapi kalau itu dikatakan berapa kira-kira average-nya? Antara 200 sampai 250.

75. PEMOHON: FERDI HENDRI ANTONI

Satu lagi, Yang Mulia, terakhir.

76. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

77. PEMOHON: FERDI HENDRI ANTONI

Jadi jika seandainya yang masuk itu adalah murid miskin dan cerdas, dan kemudian konsekuensinya mereka tidak membayar pungutan, tidak memberikan sumbangan. Maka sekolah dengan segala konsekuensi menyelenggarakan pelayanan sekolah dengan anggaran yang ada. Jadi tidak bisa maksimal meningkatkan mutu sekolah. Karena memang ini yang penting, Yang Mulia, saya mau tanya juga, ini di SMA Magelang berapa persentasi anggaran itu Pak? Yang dari APBN berapa, dari APBD berapa, dan dari masyarakat berapa?

78. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Jadi, pertanyaannya kalau ada orang tidak mampu bayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh sekolah, itu apakah mutlak, lalu tidak ... tidak bisa mendaftar. Misalnya, kecuali ada yang mensponsori atau ya hanya mampu bayar sesuai dengan sekolah-sekolah regular saja?

79. SAKSI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SOLIKHIN

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, kami menjawab. Sudah kami katakan pada kesaksian kami bahwa ketika ada anak yang mendaftar, mereka cerdas, kami tidak paksa mereka untuk membayar sesuai dengan yang ada. Karena kami menganut sistem subsidi silang. Sekarang pertanyaannya apakah sekolah hanya bergerak bisa tidak bisanya mendatangkan prestasi? Saya rasa sudah terbukti prestasinya bahwa kita tidak hanya bekerja sama dengan orang tua, masyarakat peduli pendidikan di dalam membiayai sekolah. Tetapi kita bekerja sama dengan beberapa dunia usaha, seperti contoh memang kami tidak meminta dalam bentuk uang. Misalnya, kita menyelenggarakan perpusatakaan. Kita minta salah satu NGO-nya memang berkonsentrasi untuk bisa memberikan sumbangan kepada sekolah kami, itu adalah yang kami lakukan.

Jadi, intinya adalah bahwa uang bukan masalah utama di dalam kami melayani semua masyarakat tanpa membedakan dia membayar atau tidak membayar. Nah, ini Yang Mulia, yang saya hadapkan di

hadapan Yang Mulia adalah salah satu orang tua yang kami bantu. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, silakan.

81. SAKSI DARI PEMERINTAH: POPO RIYADI

Saya tambahkan, Yang Mulia. Untuk persentasi ... secara tepat kami jelas tidak bisa menghitung dengan cepat. Tapi, tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran kami kurang lebih Rp3 Miliar, tapi Rp2 Miliar lebih itu adalah dari pemerintah karena itu merupakan gaji guru dan karyawan. Adapun pemerintah pusat pun masih memberikan suatu bantuan, yakni tadi sekitar Rp130.000.000,00 dan dari pemerintah provinsi juga bertanggung jawab sebesar Rp400.000.000,00. Dari Pemerintah Kota Magelang pun ada sekitar, sekitar ... mohon maaf, tepatnya kami tidak hafal. Sekitar Rp100.000.000,00. Sehingga bulanan sumbangan ... maaf, sumbangan dari orang tua itu memang persentasinya sangat kecil.

Siswa kami yang terpenting adalah siswa itu mendaftar. Kami belum pernah dan tidak pernah berbicara masalah keuangan terlebih dahulu. Jadi, dalam PPDB, dalam (suara tidak terdengar jelas) yang kami lampirkan, Yang Mulia. Itu hanya bidang akademik saja, tanpa ada wawancara berhubungan dengan keuangan. Kalau nanti memang sudah murni diterima, maka silakan lewat rapat pleno komite sekolah. Silakan mau memberikan sumbangan berapa pun tidak masalah, tapi tadi dirata-rata ... kalau misalnya itu memberikan sumbangan ada yang Rp50.000,00/Rp100.000,00/ada banyak yang tidak memberikan sumbangan. Nah, uang itulah yang kita optimalkan karena sudah ada sumbangan dari provinsi, dari pusat, itulah yang kita optimalkan, sehingga prestasinya bisa tetap bertahan. Terima kasih.

82. PEMOHON:

Mohon izin, Yang Mulia. Satu lagi pertanyaan.

83. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Apa? Silakan.

84. PEMOHON:

Untuk dua kepala sekolah. Saya mau tanya, apakah guru-guru yang berstatus PNS di sekolah yang Bapak-Bapak pimpin mendapatkan

honor dari sekolah? Itu saja, terima kasih. Honor yang berasal dari orang tua murid atau dari anggaran lain? Terima kasih.

85. SAKSI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SOLIKHIN

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa pada dasarnya sekolah tidak pernah memberikan honor. Yang memberikan honor adalah komite sekolah. Jadi, komite sekolah yang menentukan sesuai dengan beban kerja yang ada.

Ketika seorang guru diberikan tugas di luar tugas dia, maka komite sekolah itu mempunyai kebijakan memberikan tambahan honorer. Jadi, misalnya seorang guru sudah memenuhi tugas jam mengajar, tetapi dia juga mengajar ekstrakurikuler yang tentunya antara satu guru dan yang lain itu tidak sama, maka masing-masing guru sesuai dengan tanggung jawabnya diberikan tambahan karena memang dia bekerja di luar jam mengajar. Itu saja, terima kasih.

86. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup ya. Sekarang Majelis Hakim, dimulai dari Pak Harjono.

87. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Saya ingin bertanya kepada dua kepala sekolah. Lewatnya ... sejarahnya sebelum menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional. Apakah sekolah Bapak ini sudah menjadi semacam sekolah favorit atau unggulan di daerah itu? pertama itu.

Yang kedua adalah bedanya apa pada saat itu masih berstatus seperti dulu karena setiap kota itu biasanya punya sekolah favorit itu. sekolah favorit itu biasanya kalau mereka merasa menengah-menengah saja kepandaianya sudah enggak ... enggak pd lagi lah masuk di situ.

Oleh karena itu sudah terseleksi secara alamiah bahwa mereka yang baik hasilnya saja masuk ke situ. Bagaimana perbedaannya sebelum menjadi sekolah rintisan internasional, termasuk juga persoalan anggaran-anggaran tadi. Apakah juga anggarannya kemudian berbeda dari pusat, dari provinsi, dan lain sebagainya. Karena ada garis bahwa setiap kabupaten harus satu. Apakah keharusan itu kemudian juga menyebabkan alokasi, alokasi anggarannya beda antara sekolah Bapak ini dengan sekolah yang biasa? Karena diharapkan ada satu kabupaten ... satu. Saya tadi sebetulnya sudah mau tanya, apakah masing-masing itu ada semacam ikatan orang tua siswa, tapi sekarang ada komite sekolah.

Nah, komite sekolah ini seberapa jauh sih perannya untuk kemudian juga mengumpulkan dana? Kemudian juga untuk membiayai dana-dana sekolah? Bagaimana perannya, atau katakan saja kalau kemudian itu dikonversi menjadi sebuah jumlah itu kira-kira berapa

jumlahnya yang kemudian bisa diberikan oleh Komite Sekolah ini dalam pengelolaan? Saya pasti tidak membayangkan kalau kepala sekolah itu harus cari-cari ke sana kemari dengan pengusaha untuk bisa diberikan CSR itu pasti tidak ... nanti jadi pertanyaan ini, jadi kepala sekolah ataukah jadi public apa gitu, ya, pasti tidak. Apakah mereka datang sendiri ataukah Komite Sekolah ini yang kemudian bekerja keras untuk mencukupi itu? Ini yang datang ini, Bapak, Ibu ini Komite Sekolah apa bukan? Atau orang tua biasa? Orang tua, ya. Saya harap kalau Komite Sekolah hadir bisa memberikan ... itu saja pertanyaan saya.

Terima Kasih.

88. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Berikutnya Pak Hakim Akil Mochtar.

89. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saya mau tanya ke ... sebenarnya pemerintah mungkin, ya. Apakah benar ... ini soal kebenaran saja ini, dari anggaran yang di APBN kemudian dari sektor Kementerian Pendidikan Nasional itu, untuk sekolah RSBI dan SBI itu dialokasikan dana sebesar Rp289 miliar per tahun, sedangkan untuk sekolah standar nasional itu Rp250 miliar. Itu satu. Benar enggak itu, gitu? Itu dari APBN. Sebenarnya tanpa bertanya pun bisa dilihat juga sih, tapi karena ini untuk konfirmasi saja. Lalu untuk apa namanya ... dana pembinaan juga yang diberikan oleh pemerintah itu untuk bantuan, ya itu sifatnya bantuan, kalau yang tadi itu anggarannya memang, sebesar Rp253.000.000,00 per sekolah. Sementara untuk pembinaan menuju SSN gitu, kan kita ini banyak kualifikasi kayak naik pesawat saja gitu, ada kelas ekonomi, pesawatnya ini, beda-beda harganya. Itu Rp73.000.000,00 per sekolah. Apakah benar itu? Ini sumbernya dari APBN.

Kalau benar, gitu lho, kenapa kok terjadi perbedaan seperti itu? Sementara RSBI atau SBI itu kan, pertama dia pastilah sekolah favorit. Yang kedua, dia punya keleluasaan juga membangun akses yang lebih kuat lalu bisa mengelola sekolah itu seperti sekoah swasta juga, gitu. Padahal dia juga menyerap anggaran nasional. Bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan CSR, dan lain sebagainya.

Di samping perbedaan tadi yang sudah diungkapkan oleh Ahli ya, terutama Ahli dari Pemohon. Ya, faktanya memang masih seperti itu, tetapi dari sisi pengalokasian dana pun yang ingin saya katakan itu juga berbeda, gitu lho. RSBI itu lebih besar ketimbang sekolah standar nasional. Nah, itu sistem pendidikan nasional kita itu yang model apa? Apakah yang RSBI atau yang SN (Standar Nasional) yang menjadi patokan kita? Ini ... ini hanya untuk ... mohon dijawab nanti oleh pemerintah, kalau tidak sekarang tentu pada kesimpulan atau apa pun juga boleh untuk dijawab.

Terima kasih, Pak.

90. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Anwar Usman.

91. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak. Saya ajukan ke Ahli, Ibu Itje, Ibu Itje Khadijah. Apa yang Ibu uraikan, saya teringat salah seorang ahli pendidikan pernah saya baca di sebuah buku bernama Stanley Elam, memang betul untuk menjadi seorang guru yang baik, pendidik yang baik, termasuk dosen yang baik, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Tetapi yang sangat penting adalah kriteria yang Ibu sampaikan tadi, yaitu seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik, di samping ia harus menguasai materi yang diajarkan, hal lain yang sangat penting lagi adalah kemampuan dia ... kemampuan guru untuk mentransfer ilmu yang dikuasai. Jadi akan percumalah kalau seorang guru, dia ndak menguasai ilmu ya, bidangnya, bahasa, Inggris, Arab, dan sebagainya tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mentransfer. Pada era tahun 1970-an, Indonesia ya cukup bangga, banyak guru ya, diminta oleh beberapa negara tetangga, termasuk ya Malaysia, Singapura, Brunei untuk mengajar di sana, tapi lama-kelamaan semakin redup. Sampai munculnya sebuah ... yang kita permasalahan sekarang yaitu sekolah ... rintisan sekolah bertaraf internasional dan SBI.

Menurut Ibu, sebagai seorang Ahli di bidang pendidikan, apa sebenarnya yang salah? Memang tadi sudah disinggung oleh Ibu, gonta-gantinya ketentuan. Dulu juga sering kita dengar, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan, dan sebagainya, ganti semuanya, dirjen dan segala macam apalah. Nah sekarang ya mohon maaf, sekolahnya malah mau diganti. Ya, itu untuk Ibu yang mohon ... Ibu Ahli Pendidikan. Saya juga ya mohon maaf, latar belakang saya juga dari sekolah guru, Bu.

Kemudian untuk ini ... dari Magelang dan dari SD Menteng tadi, itu untuk ditunjuknya sekolah Bapak-Bapak ini menjadi RSBI itu, apa langsung ditunjuk atau punya kriteria tertentu, atau harus ikut tes atau bagaimana? Terima kasih.

92. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Muhammad Alim.

93. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya, saya tujukan kepada Ahli Ibu Itje. Saya pernah membaca, Ibu, suatu tulisan bahwa sebenarnya bagi kita itu ada dua pilihan ke ... soal kebahasaan ini. Kalau

katanya Philipina itu bahasa Inggris, no problem karena dia pernah dijajah oleh Amerika. Kemudian kalau Jepang katanya itu semua ba ... ba ... pengetahuan dalam ilmu-ilmu yang ditulis dalam bahasa lain, itu dia terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, dan kemudian bahasa Jepang itulah yang dipelajari. Nah sudah cukup itu dia, kita ketahui satu negara yang cukup majulah Jepang itu, bahkan Amerika Serikat pun gentar menghadapi perkembangan ekonominya. Itu ... itu ... itu bagaimana menurut Ahli?

Kemudian, tadi Ibu mengatakan bahwa di ... di Malaysia, mohon maaf Ibu sa ... setahu saya Malaysia kan pernah dijajah oleh Inggris, du ... agak bagusya bahasa Inggrisnya daripada kita bangsa Indonesia. Tapi kok kata Ibu, dia meninggalkan dan harus memakai bahasa Melayulah, bahasa Malaysia sendiri. Itu barangkali, Ibu tahu apa latar belakang pemikirannya sehingga dia menggunakan itu?

Kemudian ini sedikit agak ... agak ke Undang-Undang Dasar tapi biarlah Ibu saya tanyakan kepada Ibu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pas ayat ... alinia keempat pembukaan itu, salah satu tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah menurut Ahli mencerdaskan termasuk seluruh bangsa atau hanya segelintir bangsa yang cerdas mau dicerdaskan?

Kedua. Pasal ... eh ayat (3) dari Pasal 31 mengatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, itu juga pertanyaan saya ke sana. Dan kemudian ayat (4) mengatakan ... ayat (4) dari Pasal 31 itu mengatakan, "Memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan."

Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ... sekurang-kurangnya lho 20%, artinya kalau kurang ya ditambahi dong, dinaikkan, itu begitu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih, Pak Ketua.

94. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Achmad Sodiki. Laris ini hari ini, silakan. Sidang diperpanjang seperempat jam.

95. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Satu pertanyaan saja yang me ... menginginkan informasi dari Pemerintah ya. Dulu seingat saya di beberapa kota, mungkin salah satunya di Malang, itu ada namanya sekolah Laboratorium, ada SMA Laboratorium. Di situ yang diterima bukan hanya yang pintar-pintar, tapi yang menengah, yang juga kurang pintar juga diterima. Tetapi ketika dalam proses belajar-mengajar itu, yang pintar dilayani juga, yang menengah juga, artinya apa? Artinya yang pintar bisa selesai dua tahun, yang kurang pintar ya tiga tahun. Sehingga di situ tidak nampak adanya satu ya kesan diskriminatif antara yang pintar dan tidak pintar. Ya



artinya dalam arti bahwa sekolah itu lalu nampak dari luar bisa dimasuki siapa saja yang bisa me ... masuk ke dalam sekolah yang demikian.

Lah ini, kalau memang kemudian seleksi itu dilakukan dalam sekolah yang kita bicarakan hari ini hanya untuk yang pintar-pintar, itu memang lalu ... apakah memang lalu tidak salah kesan bahwa itu hanya untuk mereka yang pintar ya. Tetapi kemudian yang kurang itu lalu merasa tidak terlayani dengan sama kepada mereka ya. Nah ini alasan kemudian mengapa tidak dilanjutkan saja dengan proses dimana suatu sekolah itu bisa yang pintar di ... diikuti dengan secara kemampuan mereka, tapi yang kurang pintar pun diikuti. Tapi tetap saja di dalam koridor dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga ini saya kira ... saya tidak tahu mengapa pilihannya jatuh kepada yang ... mereka yang lulus atau yang lulus dengan baik, atau lulus yang ... yang cakap atau yang pintar-pintar saja. Ini sekedar permintaan apa ... informasi ya. Terima kasih.

96. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Maria.

97. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan bertanya kepada Bu Itje. Karena Ibu adalah pendidik para guru, siaga. Kalau dulu waktu kecil itu saya kalau dikatakan guru itu wajib digugu dan ditiru, gitu ya. Tapi sekarang ini sering kali saya mendengar atau membaca berita bahwa justru banyak yang tidak seperti itu. Apakah ini karena sistem pendidikan kita yang keliru atau bagaimana? Karena kalau dulu saya melihat bahwa ada Sekolah Guru Bawah, Sekolah Guru Atas, ada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sekarang itu tidak ada, tetapi di mana-mana orang mengaku sebagai guru dan bahkan sekarang banyak dan beribu-ribu guru honorer.

Nah, apakah dengan cara seperti ini adanya guru yang tidak berpendidikan sebagai guru, sehingga masalah pendidikannya, pedagoginya mungkin tidak bisa. Kalau dulu orang tidak pernah ikut dalam pendidikan guru kemudian mau menjadi dosen, misalnya harus ada ikut P4 segala macam, apa pendidikan guru itu. Apakah itu kemudian ... ini yang menjadikan pendidikan kita semakin lama semakin keterbelakang. Dulu kok orang-orang Malaysia itu kok sekolah ke Indonesia, tapi sekarang banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di Malaysia, di mana kekeliruan kita itu di mana? Apakah karena adanya aturan-aturan dalam bidang perundang-undangan yang kemudian justru sepertinya kita mau maju ke depan, tapi kemudian justru kita mundur ke belakang? Saya rasa itu, Pak Ketua.

98. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup, saya mau tanya kepada Pak Ahli, Pak Takwin, Pak Takwin ... Bagus Takwin, tapi saya akan mulai dari ... apa ... kesaksian atau data yang diberikan oleh Ibu.

Ibu, dulu, sekolah saya itu sama dengan sekolah-sekolah yang tadi ada fotonya itu seperti SD Muhammadiyah Gantong gitu asal ... yang ada di film ... apa ... Laskar Pelangi itu. Sekolahnya jelek sekali.

Kemudian, kami itu merasa kok orang-orang itu ... maaf, waktu itu masih ada istilah pribumi dan nonpribumi ya. Kok rasanya yang bisa sekolah mewah itu hanya orang nonpribumi, ya? Ada sekolah Katolik, di sekolah saya sangat maju, sedangkan sekolah-sekolah Islam itu ya kayak-kayak gitu yang Ibu foto tadi itu. Sehingga pada waktu itu, memang saya kira yang menginspirasi pemerintah membuat undang-undang seperti itu, untuk membuat kesamaan. Kenapa sih orang-orang kita sendiri kok enggak bisa buat sekolah gitu? Sehingga lalu pemerintah mungkin karena dulu banyak usul seperti itu lho sebelum ada ini, zaman-zaman saya masih ... apa namanya ... agak remaja gitu, mahasiswa, banyak yang usul, "Kenapa kita tidak bisa bikin sekolah seperti itu, orang pribumi? Kenapa orang-orang yang seperti itu?"

Nah, sekarang itu sudah tidak relevan bicara pribumi dan nonpribumi. Karena Undang-Undang Dasar itu sekarang menganggap semua orang yang lahir di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya adalah warga negara yang sama.

Nah, tadi kan bicara nasionalisme nih, kesaksian dari Magelang. Saya tanya ke Pak Takwin, apakah relevansi bicara nasionalisme dengan cara itu? Dari psikonasionalisme, ya? Sekarang ini masih relevan apa tidak? Kita tidak bisa membuat nasionalisme baru tanpa kehilangan substansi tentang nasionalisme seperti yang kita bayangkan tentang Bumiputera, pribumi-nonpribumi dulu yang sekarang tidak ada. Tapi di dalam fakta, jangan-jangan itu masih ada, diskriminasi itu. Jangan-jangan itu menjadi salah satu jalan keluar yang dibuat oleh pembuat undang-undang ini karena itu juga misalnya, harus ada dong, dana yang disisihkan sedikit untuk memberi pelayanan terhadap orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu itu.

Saya tanya itu saja, terima kasih. Mulai dari Ibu Itje.

99. AHLI DARI PEMOHON: ITJE KHADIJAH

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan kepada saya.

Yang pertama tadi, pertanyaan bagaimana pendidikan guru saat ini, sehingga guru bisa mampu mentransfer kepada siswanya. Perlu saya pikir untuk mengubah paradigma kita bahwa saat ini guru itu tidak bertugas mentransfer ilmu lagi karena adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sebetulnya ketika cuma mentransfer

pengetahuan, itu sudah relatif mudah. Tetapi yang sekarang perlu dikuasai oleh guru adalah bagaimana memfasilitasi agar ilmu tadi terkomunikasikan dengan baik kepada siswa dengan bahasa yang bisa dimengerti siswa yang kemudian mampu membuat siswa menginternalisasi ilmu yang dipelajari tadi dan kemudian mengungkap kembali apa yang telah dipelajari.

Ini yang saya pikir saat ini menjadi PR besar kita. Dan ini terhubung dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Maria yang tadi, "Kenapa guru menjadi tidak digugu lagi dan ditiru lagi?" Saat ini yang perlu ditinjau lebih utama seharusnya bukan hanya kurikulum di tingkat satuan pendidikan sekolah, tetapi kurikulum yang menyiapkan guru. Ada apa di sana? Siapa yang sekarang ini mengajar teman-teman calon guru di kampus? Cara apa yang dipakai untuk mendidik calon-calon guru ini?

Pada saat 10 tahun yang lalu IKIP diubah menjadi universitas, walaupun masih ada fakultas pendidikan, baunya beda. Baunya adalah persaingan bentuk universitas, sehingga ... apa ya ... saling ... saling ber ... berkompeten ... berkompetisi pada tataran keuniversitan, bukan konsep mendidik guru yang tugasnya nanti adalah mendidik calon atau mendidik anak-anak yang nantinya adalah warga negara pelaku negeri ini, yang tersambung pada pertanyaan sebelumnya yang juga terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, menurut saya, saat ini yang perlu ditinjau secara sangat cermat adalah proses pelatihan guru, proses rekrutmen guru. Saya tidak bisa membayangkan bahwa guru-guru pegawai ... guru-guru PNS yang sekarang mengajar adalah diterima sebagai guru PNS, lantas nyemplung begitu saja menjadi guru tanpa mendapatkan ... apa ... sosialisasi tentang mendidik di sekolah tersebut dan diandalkan bahwa melalui S1 Fakultas Pendidikan, kemudian otomatis bisa mengajar. Dan ini di lapangan menyesak dada sebenarnya karena banyak sekali teman-teman yang menjadi guru itu kepepet. Kenapa? Karena tidak tertampung di tempat lain. Dan saat ini yang terkesan buat saya adalah guru itu sebetulnya profesinya hampir sama dengan dokter. Kalau guru adalah membina dari segi psikologis pengembangan anak secara mental, sedangkan dokter secara fisik. Namun, ketika itu guru karena memang bentuknya massal dan ada keharusan bahwa setiap anak akan berfungsi hidupnya kalau dia punya ijazah, maka terkesan abal-abal. Sehingga ada banyak sekali teman-teman yang begini, "Daripada menganggur, jadi guru saja, ah!" Banyak sekali yang ... baik yang punya latar belakang pendidikan guru, tetapi sebenarnya enggak kepingin menjadi guru maupun sampai yang tidak punya kecakapan sekalipun. Dan jangan lupa, ketika kita bicara nasioanal, maka di daerah terpencil yang pernah saya kunjungi beberapa saat yang lalu, guru SMA mengajar anak SMP. Lulusan SMA mengajar anak SMP, kenapa? Karena ya tidak ada tenaga pengajar yang ... yang sampai ke sana.

Nah, ini yang menurut saya tadi terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketika kita mengatakan bahwa pengajaran adalah hak

setiap warga negara, maka yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu adalah tercukupinya hak-hak tersebut pada batasan-batasan tertentu. Pemerintah sudah membatasi bahwa batasan saat ini, pendidikan tingkat dasar adalah SD dan SMP, maka pendidikan pada level itu seharusnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum sebagian besar anggaran masuk kepada anggaran-anggaran yang untuk meningkatkan kualitas yang memang sebetulnya sudah jadi.

Kemudian, ketika ada pertanyaan tadi mencerdaskan bangsa, apakah itu semua bangsa? Menurut saya, ya, pada batasnya. Kenapa? Bukan berarti kita harus mengajar semua orang, tetapi begini, seseorang lahir berada di dalam keluarganya, kemudian dia dinaungi oleh negeri di mana dia berada, dan yang membuat dia nantinya menjadi lebih utuh sebagai warga negara negeri tersebut, sekolahlah pabriknya. Sekolah itu adalah tempat pendidikan massal masyarakat yang seharusnya dikontrol oleh negara, sehingga hasil output dari sekolah-sekolah tersebut adalah warga negara yang tadi tercerdaskan.

Oleh sebab itu, berbicara tercerdaskan, kita tidak bisa luput dari proses pembelajaran itu sendiri dan proses pembelajaran tidak akan terjadi tanpa adanya guru-guru yang cakap.

Saya rasa pertanyaan-pertanyaan tadi sudah tercakup di dalamnya. Dan untuk Malaysia, kenapa kemudian Malaysia diberitakan pada saat itu, saya membaca di New York Times pada tahun 2010. Bahwa berdasarkan kajian-kajian oleh beberapa ahli yang didatangkan dari berbagai negara, termasuk salah satunya John Clerk yang waktu itu didatangkan oleh British Consult ke Indonesia, tidak memungkinkan bagi Malaysia untuk menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran Matematika dan Sains di seluruh negara Malaysia.

Oleh sebab itu, pada saat ... pada 2012 ini diputuskan untuk kasus-kasus tertentu, maka pembelajaran Matematika dan bahasa ... dan Sains tidak lagi diwajibkan dalam bahasa asing.

Kemudian, kalau tadi perkara di Jepang dan Jepang kemudian menerjemahkan untuk supaya anak-anak berbahasa ... menimba ilmu itu dalam bahasa Jepang. Menurut saya begini, ketika proses pembelajaran bahasa asing itu dipisahkan dari hal yang lain, dan dilaksanakan dengan baik, kemudian memungkinkan anak-anak itu berkomunikasi dalam bahasa asing tersebut, maka keilmuan ini sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang dikuasai oleh anak dan ada di sekitarnya. Saya bayangkan anak-anak yang ada di pinggiran Sukabumi sana, anak-anak SD ketika belajar proses air mendidih, saya yakin mereka akan jauh lebih cepat menangkap konsep tersebut dalam bahasa Sunda yang dia pakai sehari-hari daripada ketika itu disampaikan dalam Bahasa Indonesia sekalipun. Begitu juga dalam ... di ... di kota-kota besar. Ketika disampaikan dalam Bahasa Indonesia, dibutuhkan proses yang panjang untuk memahami sebuah konsep, maka disampaikan dalam bahasa asing akan membutuhkan tiga kali lipat. Dan saya lupa mau menyampaikan pesan, apabila bahasa asing ini kemudian menjadi bagian dari proses pendidikan

kita, maka penyampaian atau pembelajaran Bahasa Indonesia seharusnya tiga kali lipat, lebih daripada yang ada sekarang. Ketika bahasa asing diperkenalkan untuk masuk di dalam kancah proses pembelajaran, maka proses peningkatan kualitas berbahasa Indonesia anak-anak kita dalam menyampaikan pendapat dalam menulis konsep, maka harus ditingkatkan sampai tiga kali. Sehingga ketika dia mampu menguraikan betul dengan menggunakan bahasa yang dikuasai, ketika dia beralih ke bahasa lain, dia juga akan mampu menyampaikan dengan baik.

Saya rasa jawaban saya sudah mencakup dari tiga pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

100. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Bagus.

101. AHLI DARI PEMOHON: BAGUS TAKWIN

Ya. Terima kasih, pertanyaannya, Yang Mulia. Mengenai sikap nasionalisme orang Indonesia, kita tidak pakai istilah itu waktu pernah meneliti tentang kebanggaan orang Indonesia. Orang Indonesia memiliki kebanggaan yang rendah, mereka tidak bangga kepada Indonesia, tapi di sisi lain, mereka punya kebutuhan yang tinggi, ingin berbangga. Kebutuhan ini yang mendorong mereka untuk mencari ... sebenarnya mereka itu kita ya, orang Indonesia. Untuk mencari cara-cara yang singkat untuk membuat mereka bangga.

Nah, kebanggaan-kebanggaan yang ... yang didapat dengan cara yang singkat ini, untuk beberapa waktu bisa ... bisa memberikan semacam kepuasan, tapi dalam waktu lama itu tidak ... tidak bertahan. Seperti misalnya apakah menang lomba olimpiade atau bisa mengirim anak juara di mana itu, itu bisa. Atau seperti bola kita kemarin.

Nah, dalam konteks RSBI ini, saya juga menduga ada kecenderungan untuk mencari cara singkat supaya kita bisa berbangga dengan Indonesia. Jadi ... nah, yang menggerakkan apa? Yang menggerakkan ketakutan.

Saya tidak ... tidak pernah meneliti khusus para pembuat undang-undang ini, terutama untuk pasal ini, tapi kira-kira kalau di ... dibayangkan secara teoretis seperti itu. Ada ketakutan yang melanda bahwa orang Indonesia akan kalah bersaing dengan asing. Asing itu dianggap sebagai lawan, padahal tadi seperti Ibu Itje bilang sekarang yang penting adalah bagaimana bisa berpartisipasi.

Kehadiran orang lain, kehadiran pihak lain, negara lain, memang bisa menjadi sumber konflik, jadi musuh, jadi kompetitor, tapi juga bisa menjadi pihak yang bisa bekerja sama, yang bisa membantu kita berkembang dalam partisipasi, bukan dalam kompetisi.

Nah, saya kira ketakutan dan kecenderungan untuk menggap orang asing sebagai lawan, sebagai pesaing, itu sedikit banyak berpengaruh dalam proses pembuatan pasal ini, undang-undang. Terima kasih.

102. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemerintah. Mau menjawab sekarang atau mau tertulis. Sekarang, silakan Pak, silakan.

103. PEMERINTAH: SUYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, Para Hakim Yang Mulia. Tadi ada pertanyaan dari antara Bapak Hakim Yang Mulia mengenai pembiayaan. Bahwa RSBI itu pembiayaannya sangat minimal dibandingkan diletakkan di APBN. Misalnya saja di SD, misalnya saja. SD itu APBN hampir Rp7,9 triliun, Rp5,6 triliun, itu adalah untuk sekolah-sekolah selain RSBI. Begitu pula dengan dana alokasi khusus, pemberdayaan lab, kemudian juga rehab sekolah. Sekolah-sekolah yang sekarang ini direhab 173 ribu ruang kelas itu juga bukan RSBI dan itu menelan biaya paling tidak Rp17 triliun sendiri. Nah, ini dari segi dana.

Kemudian tentang pencerdasan kehidupan bangsa. Saya kira saya setuju bahwa itu untuk semua bangsa, untuk semua warga bangsa Indonesia. Tetapi, itu kan Undang-Undang Dasar dan harus ada implementasinya.

Oleh karena itu, perlu strategi. RSBI itu adalah salah satu strategi untuk menuju dan mencerdaskan secara keseluruhan. Ketika ada anak bangsa yang dalam kehidupannya itu lebih unggul, ini akan menarik dampaknya. Ada multiplayer effect terhadap bangsa-bangsa anggota bangsa lain itu tadi. Dari warga bangsa kita sendiri.

Kemudian persoalan partisipasi. Partisipasi memang penting, apalagi menciptakan undang-undang dulu, suasana kebatinannya ialah supaya kita bisa berpartisipasi dalam dunia global. Berpartisipasi dalam dunia global, mustahil kita bisa melakukan tanpa ada penguasaan teknologi, bahkan bahasa sekalipun.

Saya kemarin ke Malaysia mengurus warga TKI yang harus dididik di sana. Kita membuat perjanjian, perjanjian itu dibuat dalam Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Dalam satu klausulnya dikatakan bahwa perjanjian ini dibuat dalam tiga bahasa: Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris.

Kalau terjadi penafsiran yang berbeda, kembali kepada bahasa Inggris. Itulah pentingnya bahasa Inggris untuk diajarkan, meskipun masih tertatih-tatih, tetapi semangat itu harus ada. Ini yang penting saya kira. Juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dikatakan kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagaimana kita bisa ikut

melaksanakan ketertiban dunia kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain?

Saya juga dikatakan ketika ketemu dengan banyak expert dari negara lain. Saya ditanya Indonesia selalu underrepresented di lembaga-lembaga dunia. Kita enggak satu pun punya. Jadi, hanya Bu Sri Mulyani saja saya kira yang ... di lembaga dunia itu. Ada dari FAO, UNICEF, UNESCO, enggak ada satu pun. Saya kira kita karena kurang berdiplomasi dalam bahasa dunia.

Oleh karena itu, yang namanya bahasa Inggris dan dan Bahasa Indonesia tidak perlu dipertentangkan. Bangsa Indonesia harus pintar Bahasa Indonesia dan juga harus pintar bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain. Dulu ada diceritakan bahwa bahasa bangsa Perancis misalkan, saya lihat teknologinya lebih hebat daripada negara yang berbahasa Inggris, Amerika. Pesawat terbang mereka lebih baik Airbus namanya. Orang Perancis pun enggak berani mengatakan produknya itu dalam bahasa Perancis, dia juga mengatakan, "Ini lho, pesawat terbang saya Airbus mereknya." Itu juga bahasa Inggris.

Oleh karena itu, sekali lagi, Majelis Hakim yang kami muliakan, saya kira argumentasi antara Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak perlu dipertentangkan, itu saling melengkapi. Bangsa Indonesia memang harus punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan punya kemampuan berbahasa asing yang baik.

Perkara di dalam implementasi masih jelek, itu kan tidak harus membatalkan Pasal 50 ayat (3). Kita benahi dan tentu berjalan bagaimana Saksi Ahli tadi itu bagian dari fakta yang harus kita lakukan, yang harus kita benahi dari tahun ke tahun.

Saya kira itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

104. AHLI DARI PEMERINTAH: SLAMET

Majelis Hakim, boleh saya menambah sedikit, Saksi Ahli (...)

105. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh, boleh. Mewakili Pemerintah, ya?

106. AHLI DARI PEMERINTAH: SLAMET

Ya.

107. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh.

## 108. AHLI DARI PEMERINTAH: SLAMET

Assalamualaikum wr. wb. Dalam perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia itu memang biasanya kebijakannya implementasi, evaluasi. Saya punya catatan yang cukup teliti, setiap kali kebijakan itu kurang berhasil, lalu dibubarkan. Padahal kita harus teliti, yang kurang baik itu yang mana. Apakah kebijakannya atau implementasinya dan tentu saja mesti harus ada evaluasi.

Kita ini punya 1.110, praktis ada 1.110 variasi, mungkin karena pengelolaan yang kurang pas ya, sehingga yang disampaikan dari Pihak Pemohon pun saya yakin juga yang ekstrem, Pemerintah juga ingin menyampaikan yang itu juga, yang baik-baik juga. Tapi itu kan itu hanya sampel-sampel yang itu masalah pengelolaan. Sehingga kalau memang banyak sekolah-sekolah yang mempraktikkan SBI kurang baik, itu yang kita luruskan dalam pengelolannya. Tetapi yang kita persoalkan saat ini, apakah Pasal 50 ayat (3) itu berlawanan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak yang kita persoalkan itu. Sehingga kalau memang itu yang kurang baik adalah implementasinya, saya pikir yang diper ... perlu diperbaiki implementasinya, bukan lalu SBI sebagai, sebut saja kebijakan lalu dibubarkan, padahal yang kurang baik implementasinya.

Sekadar saya tambahkan sedikit saja, Yang Mulia. Pada dasarnya SBI itu kan sederhana, cuma standar nasional plus tambahan, gitu lho. Nah, kalau standar nasional itu kan yang pokok itu, tambahan-tambahan itu memang tambahannya, tapi kan lalu kayaknya yang menjadi gara-gara ini tambahannya yang dibesar-besarkan seolah-olah SBI itu tidak berjati diri Indonesia.

Jadi, dari 6 pertanyaan itu sesungguhnya sudah tidak terlalu sulit bagi saya untuk menjawab mana SBI sama dengan standar nasional plus tambahan. Yang tambahan itu saja yang kita cari karena memang kita harus mengikuti arus globalisasi, jangan-jangan sampai Matematika kita dengan Jepang sama-sama SMP kita kalah. Tapi kalau kita yang muatan-muatan lokal, keunggulan lokal, atau keunggulan Indonesia, tidak perlu dibandingkan, yang perlu malah kita menyebarluaskan.

Jadi, lalu ini kayaknya bahasa menjadi fokus perhatian. Padahal dalam aturan utamanya, katakanlah Permendiknas Nomor 78, itu tidak mengharuskan, Pak. Sama sekali tidak mengharuskan, itu adalah pilihan-pilihan yang memang kalau mungkin di sekolah memang tidak bisa berbahasa Inggris, ya Bahasa Indonesia. Kalau memang setengah-setengah, mau 30%, ya boleh juga.

Terakhir, Yang Mulia. Pada dasarnya, saya ingin sekadar untuk menyampaikan bahwa kita ini yang kurang pas yang mana? Apakah implementasi atau memang ... apa itu ... SBI-nya, konsep SBI-nya, yaitu kebijakannya itu apa kebijakannya sendiri, regulasi SBI-nya itu sendiri. Sehingga jangan sampai kembali lagi tadi saya sampaikan ke depan kalau nanti gagal, lalu ... dari dulu saya cermati kalau kurang berhasil bubar, kurang berhasil bubar. Ya itu yang mana? Penyebabnya apa?



Kalau memang penyebabnya itu adalah pelaksanaan, apa yang disampaikan oleh beliau-beliaunya dari Pemohon ini, ini adalah pelaksanaan, gitu. Nah, mari kita benahi saja, itu adalah urusan pengelolaan, bukan urusan masalah apakah SBI kita itu melawan Undang-Undang Dasar atau tidak.

Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

109. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb. Saya kira hari ini sidang cukup. Nanti diperdalam lagi pada sidang yang akan datang dengan melanjutkan para Saksi yang hadir dan Ahli yang hadir, tetapi belum sempat didengar hari ini. Pada sidang ... mudah-mudahan betul-betul menjadi yang terakhir, Selasa, tanggal 15 Mei 2012, jam 11.00 WIB, di tempat ini. Sehingga sesudah itu nanti, sidang akan menjadwalkan penyerahan kesimpulan dan penjadwalan pengucapan vonis.

Sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.23 WIB

Jakarta, 2 Mei 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.